



BELAJAR HIDUP BERDAMPINGAN

STUDI MENGENAI PRAKTIK
PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA
DI SEKOLAH

BELAJAR HIDUP BERDAMPINGAN: STUDI MENGENAI PRAKTIK PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI SEKOLAH

**PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

2020

BELAJAR HIDUP BERDAMPINGAN: STUDI MENGENAI PRAKTIK PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI SEKOLAH

Penulis

Herman Hendrik, M.P.P., M.E. (Kontributor Utama)
Ihya Ulumuddin, M.Si. (Kontributor Anggota)
Genardi Atmadiredja, M.Sn. (Kontributor Anggota)
Imelda Widjaja, S.Si. (Kontributor Anggota)

ISBN: 978-602-0792-80-4

Penyunting:

Cahyo Pamungkas, Ph.D.
Kaisar Julizar, S.Sos.
Imelda Widjaja, S.Si.

Tata Letak:

Imelda Widjaja, S.Si.

Desain Cover:

Genardi Atmadiredja, M.Sn.

Penerbit:

Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365
Faks. +6221-5741664
Website: <http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>
Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, 2020

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjak/Copyright@2020

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Keragaman merupakan fenomena yang memiliki akar sejarah yang panjang di Indonesia. Kini, era globalisasi telah menambah cabang dan ranting keragaman tersebut. Setelah sekian lama kita dapat hidup bersama dalam keragaman yang multidimensi, terbersit sedikit kekhawatiran tentang rentannya kerukunan dan toleransi antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencegah hal tersebut, dunia pendidikan harus berperan dalam pengelolaan keragaman agama sehingga tercipta generasi yang cinta kedamaian dan penuh sikap toleran.

Dalam penelitian ini, tim peneliti telah menemukan bahwa beberapa sekolah telah mempraktikkan berbagai pengelolaan keragaman agama yang variannya cukup banyak. Salah satu poin penting yang diangkat dari hasil penelitian ini yaitu pentingnya sinergi antar berbagai pihak yang sebetulnya telah menginisiasi praktik pengelolaan keragaman agama.

Selanjutnya, kami ingin mengucapkan selamat kepada tim peneliti yang telah menyelesaikan kegiatan penelitian sekaligus menuliskannya, yang tidak hanya dalam bentuk laporan, tetapi juga dalam bentuk buku. Semoga hasil penelitian yang dinarasikan dalam buku ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan serta membuka

pintu-pintu pencerahan dan menjadi inspirasi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

Terakhir, kami bermaksud mengundang setiap pembaca buku ini untuk dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun demi terjaganya kualitas penelitian dan publikasi yang dihasilkan oleh lembaga kami.

Jakarta, Agustus 2020
Plt. Kepala Pusat,

Irsyad Zamjani, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Tim penulis mengucapkan puji serta syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berbagai limpahan nikmat-Nya, termasuk nikmat kesempatan untuk melakukan penelitian ini serta menyelesaikan laporannya. Tidak lupa, tim peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berperan dalam semua proses pelaksanaan penelitian ini; yaitu dinas-dinas yang menangani pendidikan di Kabupaten Purwakarta, Kota Depok, Kota Semarang, Kota Medan, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Sumatera Utara, serta sekolah-sekolah yang telah bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan pengumpulan data untuk penelitian ini. Secara khusus, tim peneliti menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dr. Muktiono Waspodo (mantan Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, Puslitjak) serta Irsyad Zamjani Ph.D. (Plt. Kapuslitjak, mantan Kabid Penelitian Kebudayaan Puslitjak) atas serta kritik dan saran yang disampaikan selama penyelenggaraan kegiatan penelitian ini.

Buku ini dihasilkan dari sebuah penelitian yang merupakan salah satu kegiatan dari Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan—yang kini namanya berubah menjadi Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan—pada Tahun Anggaran 2019.

Tim peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat membawa manfaat, baik itu manfaat akademis maupun manfaat praktis.

Selanjutnya, tim peneliti juga bermaksud mengundang setiap pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun, yang sekiranya dapat menjadi perbaikan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Jakarta, Oktober 2020

Tim penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	III
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR SINGKATAN	IX
Bab I Keragaman Agama dan Dunia Pendidikan	1
Bab II Regulasi dan Literatur Pengelolaan Keragaman Agama dalam Dunia Pendidikan	9
Bab III Ragam Praktik Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah	17
A. Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah-sekolah di Purwakarta	17
B. Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah-sekolah di Depok	23
C. Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah-sekolah di Yogyakarta	28
D. Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah-sekolah di Semarang	34

E. Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah-sekolah di Medan	39
F. Ragam Praktik Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah	44

Bab IV Proses Kelahiran Praktik Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah 47

A. Proses Kelahiran Praktik Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah di Purwakarta	47
B. Proses Kelahiran Praktik Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah di Depok	48
C. Proses Kelahiran Praktik Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah di Yogyakarta	49
D. Proses Kelahiran Praktik Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah di Semarang	50
E. Proses Kelahiran Praktik Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah di Medan	51
F. Faktor-faktor Pendorong Lahirnya Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah	51

Bab V Daya Tahan dan Pelembagaan Praktik Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah 53

Bab VI Model Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah 59

Bab VII Penutup 67

Daftar Pustaka	71
Biodata Penulis	75
Indeks	77

DAFTAR SINGKATAN

AKPK	: Agama, Keagamaan, dan Pendalaman Kitab-kitab
DIAN	: Dialog Antariman
DKM	: Dewan Kemakmuran Masjid
DKT	: Diskusi Kelompok Terpumpun
Ekskul	: Ekstrakurikuler
GTK	: Guru dan Tenaga Kependidikan
IKT	: Indeks Kota Toleran
Interfidei	: Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia
KBB	: Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan
Kemdikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemdiknas	: Kementerian Pendidikan Nasional
Kemenag	: Kementerian Agama
OSIS	: Organisasi Siswa Intra Sekolah
Permendikbud	: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Permendiknas	: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
PIRI	: Pendidikan Islam Republik Indonesia
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PPK	: Penguatan Pendidikan Karakter
ROHIS	: Rohani Islam
ROKAT	: Rohani Katolik
ROKRIS	: Rohani Kristen
SARA	: Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
SDIT	: Sekolah Dasar Islam Terpadu
SDN	: Sekolah Dasar Negeri
Sisdiknas	: Sistem Pendidikan Nasional
SMAN	: Sekolah Menengah Atas Negeri
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMPIT	: Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu
SMPN	: Sekolah Menengah Pertama Negeri

TMII : Taman Mini Indonesia Indah
TNI : Tentara Nasional Indonesia
YPSIM : Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda

BAB I

KERAGAMAN AGAMA DAN DUNIA PENDIDIKAN

Pengelolaan keragaman merupakan isu krusial bagi negara demokratis dan majemuk seperti Indonesia. Komitmen terhadap demokrasi menuntut Indonesia untuk memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, terlepas dari latar belakang etnis, budaya, dan agama mereka. Keragaman itu perlu dikelola mengingat ia cukup rentan menjadi pintu masuk terjadinya konflik sosial yang berlatar sikap tidak bisa menerima perbedaan serta merasa benar sendiri. Pengelolaan keragaman yang baik diharapkan dapat menghadirkan masyarakat yang mengenal dan menghormati berbagai perbedaan.

Salah satu aspek keragaman yang mencolok di Indonesia yaitu keragaman agama. Hal tersebut karena Indonesia mengakui adanya agama-agama “resmi”—yang terdiri atas agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu—serta berbagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Implikasinya yaitu negara memberikan kebebasan kepada setiap pemeluk agama—juga kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa—untuk beribadah serta mengekspresikan keyakinan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, keberagaman setiap warga negara kemudian mengejawantah hingga ke ranah pendidikan formal, khususnya sekolah.

Keragaman agama juga patut menjadi perhatian mengingat potensinya

untuk menjadi pintu masuk terjadinya konflik horizontal, yaitu antar pemeluk agama yang berbeda atau antar penganut aliran agama dari suatu agama. Sehubungan dengan itu, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah memantau potensi kerentanan sosial dari keragaman masyarakat Indonesia dengan membuat indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB). Indeks ini disusun dari tiga dimensi: kerja sama, toleransi, dan kesetaraan. Hasilnya, selama lima tahun terakhir, angka kerukunan beragama di Indonesia terbilang tinggi, meskipun mengalami pasang surut. Sebagai contoh, pada tahun 2019 skor rata-rata indeks KUB nasional adalah sebesar 73,83. Hal tersebut berarti terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya; yang mana skor rata-rata indeks KUB nasional tahun 2018 yaitu 70,90 (Republika Online, 2019).

Dari tiga aspek yang mendukung kerukunan beragama, aspek toleransi merupakan yang terendah dibandingkan dua aspek yang lain. Kemenag mencontohkan beberapa kasus intoleransi seperti penolakan pendirian masjid di Kota Kupang dan penolakan izin tinggal bagi non-Muslim di salah satu desa di Kabupaten Bantul. Untuk mengatasi tantangan intoleransi ini, sejumlah pihak berinisiatif mempromosikan sikap-sikap toleran dalam hubungan antar pemeluk agama. Kemenag sendiri mengampanyekan pentingnya “moderasi beragama” dengan menekankan pada penguatan modal sosial berupa semangat gotong royong di antara warga bangsa (Kementerian Agama, 2019).

Dalam buku “Moderasi Beragama” yang diterbitkan oleh Kemenag, dicontohkan beberapa kasus yang menggambarkan sikap toleransi beragama, yang merupakan salah satu elemen dalam moderasi beragama. Contoh pertama yaitu upacara kebaktian tutup peti mati yang dilaksanakan di halaman Masjid Darussalam, sebuah masjid di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan dengan izin dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang bersangkutan mengingat tempat tinggal keluarga jenazah terletak di dalam gang yang sempit yang menyulitkan keluar-masuknya peti mati. Contoh lainnya yaitu kebiasaan umat Hindu dan Umat

Islam di daerah Blahbatu, Gianyar, Bali, dalam bekerja sama dalam perayaan hari besar keagamaan masing-masing. Ada juga kasus Kampung Sawah, sebuah daerah di Kota Bekasi, Jawa Barat, yang masyarakatnya terdiri dari beberapa agama yang berbeda, yang terbiasa saling mengunjungi dalam acara perayaan hari besar keagamaan dan memiliki tiga rumah ibadah—masjid, gereja Kristen, dan gereja Katolik—di jalan yang sama (Kementerian Agama, 2019).

Selain Kemenag, sejumlah organisasi nonpemerintah juga terlibat dalam promosi penghormatan terhadap keragaman agama. Salah satunya adalah Wahid Foundation yang pada tahun 2018 merilis “Laporan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia (KBB) Tahun 2017.” Selain memuat berbagai kasus pelanggaran KBB, laporan tersebut juga mengetengahkan berbagai praktik baik toleransi di 32 provinsi di Indonesia (Wahid Foundation, 2018). Narasi tentang toleransi beragama juga dimunculkan melalui Indeks Kota Toleran (IKT) yang disusun dan dipublikasikan oleh Setara Institute. Dokumen IKT mencatat beberapa kota memiliki indeks toleransi yang rendah (Jakarta, Banda Aceh, dan Tanjung Balai) dan tinggi (Singkawang, Salatiga, dan Pematang Siantar) (Setara Institute, 2018). Berbagai praktik baik pengelolaan keragaman agama juga muncul dalam sejumlah laporan media massa. Republika, misalnya, melaporkan sebuah desa di Jawa Tengah yang memiliki masjid, gereja, serta pura yang berdiri berdampingan, yang didukung oleh sikap toleran di antara warganya (Republika, 2019). Sementara itu, sebuah desa di Jawa Timur terekspos karena masyarakatnya, yang beragam secara agama, terbiasa saling bergotong royong membersihkan tempat ibadah serta merayakan hari besar agama lain (Tribunnews.com, 2018).

Terkait dengan wacana keragaman agama dalam dunia pendidikan, sejumlah lembaga riset melaporkan adanya praktik dan sikap tidak mau menerima serta menghormati keragaman agama dalam dunia pendidikan. Pada akhir tahun 2018 lalu, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah merilis hasil survei bahwa

mayoritas guru beragama Islam di sekolah-sekolah di Indonesia memiliki opini intoleran dan radikal yang tinggi (PPIM UIN Jakarta, 2018). Terlepas dari adanya perdebatan, penelitian PPIM itu setidaknya dapat menjadi penggugah kesadaran tentang adanya potensi intoleransi dan radikalisme di lingkungan pendidikan formal. Adapula hasil penelitian Maarif Institute yang melaporkan tentang penetrasi paham intoleransi dan radikalisme di kalangan pelajar yang tergabung dalam organisasi siswa intra sekolah (OSIS). Dalam dokumen tersebut, dilaporkan bahwa ideologi intoleran dan radikal telah merasuk ke dalam personel OSIS dengan melibatkan jaringan alumni, lembaga keagamaan, dan partai politik (Maarif Institute, 2018).

Meskipun demikian, tidak sedikit pula lembaga pendidikan yang telah berupaya untuk mempromosikan penghormatan terhadap keragaman agama. Yayasan Cahaya Guru, misalnya, menerbitkan sebuah buku yang memuat narasi tentang sejumlah sekolah dengan praktik baik pengelolaan keragaman agama di Indonesia. Salah satu contohnya adalah sekolah yang berada di bawah Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda di Medan yang menyelenggarakan pendidikan multikultural. Sekolah tersebut memiliki empat rumah ibadah dari agama yang berbeda-beda, yaitu masjid, gereja, vihara, dan pura (Yayasan Cahaya Guru, 2019). Hasil kajian Maarif Institute juga mengidentifikasi beberapa sekolah yang memiliki kegiatan yang dianggap mendukung penghormatan terhadap keragaman agama, salah satunya yaitu SMAN 1 Kabupaten Cirebon, yang memiliki kegiatan “Karnaval Kebinekaan”, di mana para siswa diakrabkan dengan kebinekaan dengan cara memakai pakaian adat yang ada di nusantara (Maarif Institute, 2018).

Uraian di atas telah sedikit mengulas tentang wacana keragaman agama di Indonesia, termasuk di dunia pendidikan. Di satu sisi, keragaman agama dapat menjadi sumber konflik horizontal; serta ada potensi merebaknya sikap yang tidak mau menerima dan menghormati keragaman agama, baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan peserta didik. Di sisi lain, telah pula ditunjukkan bahwa sudah ada unit-unit sosial kemasyarakatan

serta satuan-satuan pendidikan (baca: sekolah) yang telah dapat mengelola keragaman agama secara baik. Hal itu mendorong pada pemikiran bahwa dunia pendidikan merupakan salah satu pintu masuk terbaik untuk mempromosikan penghormatan terhadap keragaman agama, karena pandangan dan sikap tertentu dapat disosialisasikan secara efektif melalui lembaga pendidikan. Lebih jauh lagi, dalam situasi keragaman yang rentan, pendidikan memiliki dua potensi sekaligus: mengantisipasi ataupun justru memperparah kerentanan.

Berangkat dari hal-hal tersebut, dirasa perlu untuk mengidentifikasi lebih lanjut upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai sekolah untuk mengelola keragaman agama. Sehubungan dengan itu, buku ini memaparkan berbagai praktik pengelolaan keragaman agama yang dilakukan oleh beberapa sekolah.¹ Selain itu, buku ini juga akan mengkaji proses-proses yang memungkinkan munculnya praktik-praktik pengelolaan keragaman agama tersebut serta upaya-upaya untuk melembagakannya.

Dalam tataran yang lebih spesifik, berbagai uraian dalam buku ini berangkat dari upaya untuk dapat menjawab tiga pertanyaan. *Pertama*, bagaimana praktik-praktik pengelolaan keragaman agama yang ada di sejumlah sekolah di Indonesia? Praktik-praktik pengelolaan keragaman agama dalam buku ini akan dilihat dari berbagai aspek; dari penyediaan sarana dan prasarana hingga kurikulum. Setiap hal yang dianggap sebagai pengelolaan keragaman oleh para informan akan dikemukakan dalam buku ini. *Kedua*, bagaimana proses kelahiran praktik-praktik tersebut? Proses-proses yang memungkinkan berbagai praktik itu muncul penting untuk melihat faktor-faktor yang bermain di dalamnya. *Ketiga*, bagaimana daya tahan dan strategi pelembagaan praktik-praktik tersebut? Daya tahan di

1 Dalam buku ini juga ada beberapa kasus tentang pengelolaan keragaman dalam aspek kesukubangsaaan atau kedaerahan. Kasus tersebut tetap dikemukakan di buku ini mengingat dalam konteks Indonesia keragaman dalam aspek tersebut juga dapat mencerminkan keragaman dalam aspek agama. Sebagai contoh yaitu bahwa orang Manado, Ambon, dan Papua akan diasosiasikan dengan agama Kristen atau Katolik; orang Bali akan diasosiasikan dengan agama Hindu; sementara orang Madura, Betawi, dan Melayu akan diasosiasikan dengan agama Islam.

sini maksudnya yaitu kemampuan setiap praktik dalam menjaga setiap warga sekolah, terutama siswa, dari penetrasi paham serta tindakan yang tidak menerima dan menghormati keragaman agama. Sementara yang dimaksud dengan pelebagaan dalam buku ini yaitu berbagai upaya untuk membuat praktik-praktik tersebut menjadi sistematis, terorganisasi, atau bahkan formal; sehingga dapat diterapkan dalam cakupan dan konteks yang lebih luas.

Buku ini didasarkan pada suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan diskusi kelompok terpumpun (DKT, atau *focused group discussion* [FGD]), wawancara, dan observasi. DKT dan wawancara dilakukan dengan perwakilan sekolah yang dianggap memiliki praktik pengelolaan keragaman agama yang baik. Wawancara juga dilakukan terhadap pihak lain yang terkait dengan sekolah, misalnya perwakilan yayasan pendidikan untuk kasus sekolah-sekolah swasta. Sementara itu, observasi dilakukan terhadap berbagai aspek fisik yang terkait dengan pengelolaan keragaman agama; seperti taman, ruangan belajar, sarana dan prasarana ibadah, fasilitas ekstrakurikuler, spanduk, buku, komik, dan poster.

Informan penelitian ini adalah para perwakilan sekolah yang dianggap memiliki praktik pengelolaan keragaman agama yang baik, terutama kepala sekolah. Dalam kasus keberadaan sekolah yang memiliki praktik pengelolaan keragaman agama tidak dapat diidentifikasi, maka sekolah yang dipilih yaitu sekolah yang dikenal berprestasi dan/atau berlokasi tidak terlalu jauh dari tempat pelaksanaan DKT, dengan pertimbangan kelancaran proses kegiatan pengumpulan data. Kriteria pemilihan informan adalah pemahaman tentang praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah tempatnya mengajar/bekerja, meskipun akhirnya para peserta yang hadir merupakan hasil keputusan sekolah. Dalam hal wawancara, informan bisa lebih dipilih secara selektif, karena tim peneliti mendatangi tempat keberadaan informan yang bersangkutan. Daftar informan penelitian ini dituangkan dalam Tabel 1 di bawah.

Lokasi penelitian ini yaitu lima daerah yang teridentifikasi memiliki sekolah-sekolah yang mempraktikkan pengelolaan keragaman agama. Lokasi-lokasi tersebut yaitu Medan (Sumatera Utara), Semarang (Jawa tengah), Depok (Jawa Barat), Purwakarta (Jawa Barat), dan Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta). Kota Medan dipilih karena di sana ada SD, SMP, SMA, dan SMK Sultan Iskandar Muda yang dikabarkan mempraktikkan pendidikan multikultural. Kota Semarang dipilih karena di sana ada sekolah-sekolah yang telah mendapatkan pendampingan program “Sekolah Damai” dari Wahid Foundation. Kota Depok dipilih karena di sana terdapat banyak sekolah berbasis yayasan pendidikan Islam yang menarik untuk dikaji visi keragamannya. Kabupaten Purwakarta dipilih karena keberadaan SMPN 1 Kabupaten Purwakarta yang tercatat menyediakan ruang belajar untuk agama yang berbeda-beda, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tentang penguatan pendidikan karakter. Sementara Kota Yogyakarta dipilih karena di sana terdapat beberapa sekolah yang mengusung tema toleransi beragama sebagai salah satu basis pembelajarannya.

Tabel 1. Informan yang Terlibat dalam DKT dan Wawancara

Lokasi	Informan
Purwakarta	Perwakilan dari SMPN 1 Purwakarta, SMPN 3 Purwakarta, SMPN 5 Purwakarta, SMP Talenta, SMP Plus Al-Muhajirin, SDN 1 Nagrikidul, SDN 1 Nagrikaler, SDN 1 Nagritengah, SDN 4 Ciseureuh, dan SD Yos Sudarso.
Depok	Perwakilan dari SDN Anyelir 1, SDN Depok Baru 2, SDN Mekar Jaya 13, SMPN 2 Depok, SMPN 10 Depok, SMPN 3 Depok, SDIT Pondok Duta, SMPIT Nurul Fikri, SDIT Nurul Fikri, SMPIT Darul Abidin, dan SDIT Miftahul Ulum (tidak hadir DKT, tetapi dikunjungi).
Yogyakarta	Perwakilan dari SMAN 1 Yogyakarta dan SMAN 3 Yogyakarta, SMA Tumbuh, Sekolah Olifant, SMA BOPKRI 1, SMA PIRI 1, dan SMA Budi Mulia Dua (mantan guru).

Lokasi	Informan
Semarang	Perwakilan dari SMAN 7 Semarang, SMAN 11 Semarang, SMAN 10 Semarang, SMAN 3 Semarang, SMPN 13 Semarang, SMPN 39 Semarang, SMPN 12 Semarang, SDN Sendang Mulyo, SDN Tandang 1, SDN Pendrikan Kidul, dan SMK Kanisius Ungaran.
Medan	Perwakilan dari SMAN 1 Medan dan SMAN 2 Medan, SD Sultan Iskandar Muda, SMP Sultan Iskandar Muda, SMA Sultan Iskandar Muda, dan SMA Santo Thomas 1.

Sumber: Tim peneliti.

Data yang diperoleh dari proses penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara klasifikasi temuan berdasarkan isu tertentu, sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun unit analisis dalam penelitian ini yaitu sekolah.

Buku ini terdiri atas tujuh bab. Bab pertama memaparkan tentang isu keragaman agama dalam kaitannya dengan dunia pendidikan. Bab kedua berisi tentang telaah atas berbagai regulasi dan literatur mengenai pengelolaan keragaman agama dalam dunia pendidikan. Bab ketiga menggambarkan berbagai macam praktik pengelolaan keragaman agama yang ditemukan dalam penelitian yang menjadi dasar buku ini. Bab keempat menjelaskan tentang proses kelahiran praktik-praktik pengelolaan keragaman agama di dekolah. Bab kelima menguraikan aspek daya tahan dan upaya pelebmbagaan berbagai praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah. Bab keenam mendiskusikan model-model pengelolaan keragaman agama di sekolah. Sementara itu, bab ketujuh merupakan bab penutup buku ini.

BAB II

REGULASI DAN LITERATUR PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Dalam khazanah peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengelolaan keragaman—baik keragaman secara umum maupun keragaman agama secara khusus—dalam dunia pendidikan memang belum dibahas secara khusus, atau menjadi subjek tersendiri. Namun, ada beberapa produk hukum yang dapat diasosiasikan dengan pengelolaan keragaman. Peraturan dan perundang-undangan yang teridentifikasi dalam kajian ini yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Permendikbud tentang PPK), Lampiran Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Permendikbud tentang Penumbuhan Budi Pekerti), dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan (Permendiknas tentang Pembinaan Kesiswaan).

Dalam UU Sisdiknas, setidaknya ada tiga poin yang dapat dikaitkan dengan pengelolaan keragaman dalam dunia pendidikan. Poin yang pertama terdapat pada Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan

kemajemukan bangsa.” Poin kedua ada dalam Pasal 11 ayat (1), yang berbunyi: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.” Poin ketiga terkandung dalam Pasal 36 ayat (3), yang berbunyi: “Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan akhlak mulia; c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f. tuntutan dunia kerja; g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama; i. dinamika perkembangan global; dan j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan” (Republik Indonesia, n.d.).

Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas mengamanatkan, di antaranya, agar pendidikan nasional diselenggarakan tanpa diskriminasi dan menjunjung kemajuan bangsa. Pasal dan ayat itu menyasar penyelenggara pendidikan. Sementara itu, Pasal 11 ayat (1) UU Sisdiknas mengamanatkan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Pasal dan ayat itu juga menyasar penyelenggara pendidikan. Adapun Pasal 36 ayat (3) UU Sisdiknas mengamanatkan agar kurikulum disusun dengan memperhatikan, salah satunya, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Pasal dan ayat tersebut mengimplikasikan desain kurikulum harus menghasilkan peserta didik yang mampu menjaga persatuan nasional dan berpegang pada nilai-nilai kebangsaan.

Dalam Permendikbud tentang PPK, setidaknya ada satu poin yang dapat dikaitkan dengan pengelolaan keragaman. Hal itu terkandung dalam Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi: “PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi,

komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab” (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, n.d.-a). Pasal dan ayat tersebut mengimplikasikan bahwa salah satu nilai yang diterapkan dalam pendidikan karakter yaitu toleran.

Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) juga menyinggung poin yang terkait dengan pengelolaan keragaman. Dalam lampirannya, dinyatakan bahwa “Pelaksanaan PBP didasarkan pada nilai-nilai dasar kebangsaan dan kemanusiaan yang meliputi pembiasaan untuk menumbuhkan: b. keteguhan menjaga semangat kebangsaan dan kebhinnekaan untuk merekatkan persatuan bangsa, yaitu mampu terbuka terhadap perbedaan bahasa, suku bangsa, agama, dan golongan, dipersatukan oleh keterhubungan untuk mewujudkan tindakan bersama sebagai satu bangsa, satu tanah air dan berbahasa bersama bahasa Indonesia” (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, n.d.-b). Hal tersebut mengimplikasikan bahwa salah satu budi pekerti yang diharapkan tumbuh dalam diri peserta didik yaitu sikap terbuka terhadap berbagai perbedaan.

Sementara itu, Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan melalui Pasal 3 ayat (2) mengamanatkan bahwa salah satu materi dalam pembinaan kesiswaan yaitu tentang toleransi sosial. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal dan ayat tersebut, yaitu: “Materi pembinaan kesiswaan meliputi: a. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b. Budi pekerti luhur atau akhlak mulia; c. Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara; d. Prestasi akademik, seni, dan/atau olahraga sesuai bakat dan minat; e. Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural; f. Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan; g. Kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi; h. Sastra dan budaya; i. Teknologi informasi dan komunikasi; j. Komunikasi dalam bahasa Inggris” (Kementerian Pendidikan Nasional, n.d.).

Uraian di atas telah menunjukkan bahwa pengelolaan keragaman,

termasuk keragaman agama, pada dasarnya sudah memiliki dasar hukum. Hal tersebut berarti bahwa praktik pengelolaan keragaman agama merupakan implementasi atau pelaksanaan amanat dari berbagai peraturan dan perundang-undangan yang disinggung di atas. Oleh karena itu, pengelolaan keragaman agama menjadi hal yang patut diperhitungkan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam mengelola keragaman agama, hal utama yang dibutuhkan yaitu sikap moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan “cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama” (Kementerian Agama, 2019, pp. 17–18). Moderasi beragama juga harus dilihat “sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif)” dan sikap yang berada di tengah-tengah di antara ekstremisme dan liberalisme (Kementerian Agama, 2019, p. 18).

Sementara itu, dalam mengidentifikasi praktik-praktik pengelolaan keragaman agama, penelitian ini berpegang pada konsep “pengelolaan dari dalam”. Mengelola keragaman dari dalam berarti “mengelola keragaman berdasarkan pada nilai-nilai masyarakat setempat yang menjadikan agama sebagai sumber nilai (non sekular-liberal)” (Sila, 2017, p. 119). Dalam konsep ini, pengelolaan keragaman memberi “penghormatan terhadap nilai-nilai komunal dari kelompok mayoritas menjadi yang utama sambil tetap memberikan ruang bagi kelompok minoritas” (Sila, 2017, p. 119). Penekanan konsep tersebut yaitu pada berbagai kesepakatan yang telah tumbuh dalam masyarakat atau komunitas dalam mengelola keragaman sesuai dengan konteks sejarah dan politik mereka masing-masing (Sila, 2017).

Buku ini melihat berbagai praktik pengelolaan keragaman agama yang ada di sekolah-sekolah dalam kerangka moderasi beragama dan pengelolaan keragaman dari dalam. Maksudnya yaitu bahwa penelitian ini menghindarkan diri dari penafsiran kebebasan beragama yang bersifat subjektif seperti orientasi sekular-liberal maupun yang dibatasi oleh hak-

hak komunal. Sebagai implikasinya, dalam mengidentifikasi praktik-praktik pengelolaan keragaman agama yang ada di sekolah, studi ini mencatat setiap praktik yang dipersepsikan dan dikonseptualisasikan oleh setiap informan sebagai hal yang berkontribusi terhadap pengelolaan keragaman agama.

Kajian mengenai keragaman agama di dunia pendidikan telah banyak dilakukan. Sebagai contoh yaitu tulisan Apriliani dan Ghazali (2016), yang mengemukakan bahwa pengurus ROHIS suatu SMA di Bekasi memiliki sikap toleransi yang tergolong pasif. Kriteria yang mereka gunakan ialah adanya penerimaan dan penghormatan terhadap perbedaan agama serta pemberian kesempatan bagi siswa beragama lain untuk beribadah; yang dilandasi dengan alasan penghindaran terhadap konflik karena perbedaan agama serta adanya pandangan bahwa sekolah negeri berarti harus inklusif terhadap semua agama.

Hasil kajian Maarif Institute (2018) sebetulnya telah mengidentifikasi praktik-praktik baik pengelolaan keragaman agama di sekolah. Praktik-praktik baik yang dicontohkan itu ada di beberapa sekolah di Cirebon. Adapun kegiatannya berupa pengenalan dan pengalaman fakta kebinekaan, penyelenggaraan karnaval kebinekaan, dan kerja sama dengan TNI dan POLRI serta dengan ormas yang dianggap mendukung Islam moderat.

Ada pula kajian yang sangat berkaitan dengan penelitian ini. Contoh yang pertama yaitu kajian oleh Karolina, Sulistyarini, dan Rustiyarso (2019) mengenai peran sekolah dalam membangun sikap toleransi beragama. Dalam tulisannya, para penulis mengemukakan bahwa, dalam kasus yang mereka pelajari di SMAN 3 Pontianak, hal-hal yang dilakukan sekolah untuk menumbuhkan toleransi beragama yaitu berupa himbauan dan tindakan nyata. Himbauan berisi tentang tuntunan untuk selalu menghormati perbedaan agama dan menjaga persatuan. Sementara tindakan nyata berupa pemberian teladan dalam berlaku adil terhadap setiap

orang yang berbeda agama serta penyediaan sarana dan prasarana untuk perayaan hari besar setiap agama.

Contoh kajian lainnya yaitu penelitian Handayani (2016), yang mengidentifikasi upaya salah satu sekolah di Magelang—yaitu SMAN 1 Muntilan—dalam rangka menangkal diskriminasi terhadap minoritas, terutama dalam hal agama. Upaya-upaya tersebut yaitu: akomodasi pendidikan agama minoritas seperti Budha serta penyamaan persepsi tentang keberagaman bahwa sekolah dimaksud merupakan sekolah negeri diperuntukkan bagi setiap orang, yang dilakukan dalam acara *briefing* atau apel pagi. Upaya lainnya adalah penyediaan rumah ibadah bagi siswa beragama selain Islam dan penyediaan rubrik bagi organisasi kerohanian Katolik dan Kristen di majalah sekolah. Sekolah tersebut juga berusaha untuk memfasilitasi kegiatan spiritual siswa Katolik dan Kristen dan perayaan Idul Kurban/Adha secara bersama-sama lintas agama.

Sementara itu, hasil studi Raihani (2014) memaparkan tentang praktik toleransi beragama di sebuah sekolah negeri di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam artikelnya, terungkap bahwa para siswa dan guru di sekolah dimaksud telah memiliki paham toleransi serta mempraktikkannya. Hal tersebut dipengaruhi oleh modal kebudayaan (*cultural capital*) para siswa yang memang sudah terbiasa dengan perbedaan agama dan etnisitas. Namun, praktik-praktik toleransi beragama itu masih bersifat sporadis, dalam pengertian tidak terencana dan tidak terlembagakan (Raihani, 2014).

Hasil-hasil penelitian tersebut telah memberi sedikit gambaran mengenai upaya sekolah dalam mengelola keragaman agama. Namun, penelitian-penelitian itu tidak mengungkapkan proses-proses yang berkontribusi terhadap terwujudnya praktik-praktik tersebut. Sehubungan dengan itu, berbeda dengan kajian-kajian

sebelumnya, buku ini berusaha untuk menggali praktik-praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah serta proses-proses yang memungkinkan praktik-praktik tersebut hadir.

BAB III

RAGAM PRAKTIK PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI SEKOLAH

Bagian ini akan memaparkan temuan-temuan penelitian dari lima daerah, yaitu: Purwakarta, Depok, Yogyakarta, Semarang, dan Medan. Uraian meliputi ragam praktik pengelolaan atau pengenalan keragaman agama yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di masing-masing lokasi.

A. PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI SEKOLAH-SEKOLAH DI PURWAKARTA

Sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan DKT di Kabupaten Purwakarta terdiri atas sekolah-sekolah negeri dan swasta, dari jenjang SD dan SMP. Sekolah-sekolah tersebut yaitu SMPN 1 Purwakarta, SMPN 3 Purwakarta, SMPN 5 Purwakarta, SMP Talenta, SMP Plus Al-Muhajirin, SDN 1 Nagrikidul, SDN 1 Nagrikaler, SDN 1 Nagritengah, SDN 4 Ciseureuh, dan SD Yos Sudarso.

Praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah-sekolah di Purwakarta dapat dikelompokkan menjadi praktik di sekolah negeri dan praktik di sekolah swasta. Ragam praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah negeri yaitu sebagai berikut: pementasan teater bertema keragaman; berbagi fasilitas dengan rumah ibadah yang lokasinya

berdekatan; fasilitasi kegiatan peningkatan iman dan takwa bagi setiap siswa sesuai agamanya masing-masing; kontrak belajar per kelas yang salah satu butirnya berkaitan dengan penghormatan terhadap setiap agama; penyediaan ruang belajar untuk mata pelajaran agama selain Pendidikan Agama Islam; dan penyelenggaraan kegiatan santunan untuk anak yatim dan fakir miskin secara lintas agama.

Pementasan teater bertema keragaman merupakan acara yang diselenggarakan oleh SDN 1 Nagrikidul. Acara tersebut merupakan bagian dari implementasi penguatan pendidikan karakter. Sebagai bagian dari implementasi penguatan pendidikan karakter, tema teater di SDN 1 Nagrikidul tidak selalu terkait dengan keragaman, sehingga bersifat tidak rutin dan tergantung dari nilai karakter utama yang hendak diusung. Tema keragaman yang dimaksud yaitu tentang suku-suku bangsa yang ada di Indonesia.

Berbagi fasilitas dengan rumah ibadah yang lokasinya berdekatan dilakukan oleh SDN 1 Nagritengah. Rumah ibadah yang dimaksud yaitu berupa kelenteng. Hal tersebut berkaitan dengan lokasi bangunan sekolah yang memang bersebelahan dengan kelenteng. Tepatnya, kelenteng yang bernama Kelenteng Shen Tee Bio tersebut berada di depan sekolah, atau berdampingan dengan gerbang sekolah. Mengingat kedua gedung tersebut berbagi halaman, maka interaksi di antara warga sekolah dengan umat yang memanfaatkan kelenteng tidak terelakkan. Lebih jauh lagi, pihak sekolah juga memberikan izin kepada pihak kelenteng untuk menggunakan halaman sekolah ketika berlangsung acara keagamaan, misalnya perayaan tahun baru Imlek. Keberadaan kelenteng tersebut dianggap baik oleh pihak sekolah untuk memahamkan siswa mengenai keragaman agama.

Fasilitasi kegiatan peningkatan iman dan takwa bagi setiap siswa sesuai agamanya masing-masing dilakukan oleh SMPN 1, SMPN 3, dan SMPN 5 Purwakarta. Fasilitasi ini berupa penyediaan guru agama, keagamaan, dan pendalaman kitab-kitab (AKPK). Guru AKPK disediakan bagi setiap agama yang dianut oleh siswa di Purwakarta. Untuk siswa beragama Islam,

disediakan guru AKPK yang mengajarkan membaca Al-Qur'an (*iqro*) serta kitab kuning (kitab klasik ke-Islam-an). Sementara untuk agama lain, diberikan keleluasaan kepada para guru AKPK terkait untuk mendalami agama, khususnya kitab-kitab, masing-masing. Gagasan utama dari program ini yaitu pemenuhan kebutuhan pendidikan agama dari/dengan sumber yang jelas yang diarahkan pada penumbuhan dan pengembangan sikap yang menerima dan menghormati perbedaan agama. Hal tersebut untuk menghindarkan para peserta didik dari sumber pembelajaran agama yang berpotensi mengarahkan mereka kepada paham yang anti terhadap keragaman agama.

Kontrak belajar diberlakukan di SMPN 3 Purwakarta. Kontrak tersebut dibuat oleh masing-masing siswa pada masa awal tahun ajaran berdasarkan poin-poin yang disepakati bersama dengan wali kelas. Salah satu butirnya berkaitan dengan penghormatan terhadap setiap agama; di samping butir-butir lain yang berkaitan dengan, misalnya, kedisiplinan dan akademik.

Penyediaan ruang belajar untuk mata pelajaran agama selain Pendidikan Agama Islam dilakukan oleh SMPN 1 dan SMPN 5 Purwakarta. Ruang belajar tersebut ditujukan bagi pembelajaran pendidikan agama maupun sesi guru AKPK. Sesi guru AKPK biasanya dilaksanakan pada hari Jumat di pagi hari, sebagaimana dijadwalkan sebagai waktu penyucian diri dalam program pendidikan karakter di Kabupaten Purwakarta. Ruangan tersebut ada yang permanen, ada pula yang tidak permanen. Sebagai contoh, untuk tahun ajaran 2019/2020, SMPN 1 hanya menyediakan ruang untuk siswa beragama Protestan dan Katolik, dan ruangan untuk kedua agama tersebut relatif permanen. Beda halnya dengan ruangan untuk agama lain. SMPN 1 memfungsikan ruangan yang sebelumnya digunakan oleh siswa beragama Hindu untuk kepentingan lain, mengingat tidak ada lagi siswa beragama Hindu di tahun ajaran berjalan. Namun, jika suatu waktu ada siswa beragama Hindu, dan juga agama-agama lainnya, masuk ke SMPN 1, maka sekolah akan menyediakannya.

Penyelenggaraan kegiatan santunan untuk anak yatim dan fakir miskin

secara lintas agama dilaksanakan oleh SMPN 1 Purwakarta. Kegiatan tersebut disesuaikan dengan momentum perayaan hari-hari besar tertentu, misalnya tahun baru Islam. Penyumbang dan penerima santunan tidak dibatasi berdasarkan agama yang dianut atau kategori apapun. Hal tersebut semata untuk mengajarkan siswa tentang kepedulian tanpa memandang latar belakang orang yang membutuhkan bantuan.

Adapun ragam praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah swasta di Purwakarta yaitu sebagai berikut: penerimaan siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang beragam secara agama meskipun sekolahnya berada di bawah yayasan pendidikan agama tertentu; kebiasaan berdoa bersama dengan pemimpin doa bergiliran lintas agama; pemberian kesempatan kepada setiap siswa untuk beribadah sesuai agamanya; kegiatan pengumpulan dan distribusi donasi lintas agama; penyediaan tempat beribadah; seleksi guru berdasarkan paham keagamaan yang moderat; penanaman nilai-nilai toleransi dalam masa orientasi guru; penggunaan sumber belajar yang dianggap moderat; pemberian teladan tentang keterbukaan dalam pergaulan; penanaman nilai-nilai keagamaan yang moderat dalam bentuk ceramah; dan *study tour* dalam rangka memperkenalkan keragaman agama dan suku bangsa.

Penerimaan siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang beragam secara agama meskipun sekolahnya berada di bawah yayasan pendidikan agama tertentu terjadi di SD Yos Sudarso dan SMP Talenta. Kedua sekolah tersebut merupakan sekolah yang berada di bawah yayasan pendidikan Katolik, tetapi mereka menerima siswa, guru, dan tenaga kependidikan dengan latar belakang agama apapun. Hal tersebut sebetulnya sejalan dengan iklim keragaman yang ada di kedua sekolah itu. Masyarakat dari berbagai latar belakang agama berminat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di kedua sekolah tersebut karena kualitasnya. Hal itulah yang kemudian memunculkan keragaman di kedua sekolah tersebut. Dalam kasus lain, ada Yayasan

Al-Muhajirin yang berbasis Islam, di mana SMP Plus Al-Muhajirin bernaung, bersedia mempekerjakan seorang guru pianika, untuk kepentingan kegiatan ekstrakurikuler, yang beragama Kristen.

Kebiasaan berdoa bersama sebelum memulai pelajaran, dengan pemimpin doa bergiliran lintas agama, dilaksanakan di SMP Talenta. Doa yang dipanjatkan sesuai tata cara yang memimpin doa. Pemberian kesempatan kepada setiap siswa untuk beribadah sesuai agamanya juga dilakukan oleh SMP Talenta. Sebagai sekolah yang berada di bawah yayasan pendidikan Katolik, SMP Talenta memberikan waktu kepada siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang beragama Islam untuk melaksanakan shalat Jumat, yang berarti ada penyesuaian waktu pembelajaran. Hal lain yang dilakukan oleh SMP Talenta yaitu kegiatan pengumpulan dan distribusi donasi lintas agama. Dalam hal ini, penyumbang dan penerima donasi tidak dikaitkan dengan latar belakang agamanya. Setiap orang boleh menyumbang dan setiap orang dapat menjadi penerima donasi, terlepas dari agama yang mereka anut, selama mereka tergolong orang yang membutuhkan. Sementara itu, penyediaan tempat beribadah bagi agama lain dilaksanakan oleh SMP Talenta dan SD Yos Sudarso. Di dua sekolah berbasis Katolik tersebut, tersedia musala dan perlengkapan salat yang diperuntukkan bagi warga sekolah untuk menunaikan ibadah salat, baik yang wajib maupun sunnah, selama mereka berada di sekolah.

Seleksi guru berdasarkan paham keagamaan yang moderat dilakukan oleh SMP Plus Al-Muhajirin. Selain seleksi dokumen, tahap seleksi yang paling menentukan dalam hal ini yaitu sesi wawancara; di mana calon pengajar diberi berbagai pertanyaan yang menggali latar belakang, riwayat aktivitas dan keterlibatan dalam berbagai organisasi, dan pandangan mereka tentang berbagai aspek terkait ajaran Islam. Tujuan utama dari wawancara tersebut yaitu memastikan bahwa mereka bersedia untuk tunduk kepada konsep

pesantren tentang ke-Islam-an, yaitu Islam yang moderat.

Penanaman nilai-nilai toleransi dalam masa orientasi guru dilakukan oleh SMP Plus Al-Muhajirin. Hal tersebut merupakan kelanjutan dari proses rekrutmen guru di sekolah dimaksud. Kegiatan orientasi itu memakan waktu selama dua hari. Di dalamnya diberikan berbagai materi, terutama penguatan visi-misi serta amalan-amalan khas Al-Muhajirin. Dalam visi-misi Al-Muhajirin itulah terdapat nilai-nilai toleransi.²

Penggunaan sumber belajar yang dianggap moderat dilaksanakan oleh SMP Plus Al-Muhajirin. Sumber belajar yang dimaksud yaitu kitab-kitab klasik agama Islam yang diajarkan kepada para siswa/santri Al-Muhajirin. Yayasan Al-Muhajirin mengikuti garis keilmuan tertentu yang diyakini moderat. Di samping itu, Yayasan Al-Muhajirin juga menghindarkan siswa/santri dari kitab-kitab dan pemikiran-pemikiran yang dianggap dapat membawa kepada radikalisme dan intoleransi.

Pemberian teladan tentang keterbukaan dalam pergaulan dilakukan di SMP Al-Muhajirin. Sebagai yayasan pendidikan Islam, pihak Yayasan Al-Muhajirin memberikan teladan bahwa tidak masalah untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang-orang non-Islam, selagi dapat membedakan aspek muamalah dan akidah. Dalam sejarahnya, pendirian yayasan melibatkan kerja sama antara pendiri yayasan dengan koleganya yang beragama non-Islam. Hingga kini, kerja sama dalam hal pengembangan bisnis pesantren juga tetap berjalan dengan keterlibatan pihak-pihak beragama non-Islam.

Penanaman nilai-nilai keagamaan yang moderat dalam bentuk

2 Dalam tahap orientasi ini, nilai-nilai toleransi seorang calon pengajar benar-benar ditempa. Ada beberapa kasus calon pengajar akhirnya mengundurkan diri dari proses rekrutmen karena merasa tidak sesuai dengan visi keragaman Yayasan Al-Muhajirin. Jadi, tahap orientasi tersebut menjadi semacam proses penyaringan kedua untuk memastikan bahwa pemahaman keagamaan seorang calon pengajar sesuai dengan visi-misi Yayasan Al-Muhajirin.

ceramah dilakukan di SMP Plus Al-Muhajirin. Ceramah-ceramah tersebut dapat dilakukan sewaktu-waktu, misalnya mengambil momentum sambutan kegiatan sekolah dan pesantren, atau ceramah mingguan yang bersifat rutin. Dalam setiap ceramah itulah pimpinan yayasan senantiasa berpesan tentang toleransi, terutama toleransi beragama.

Study tour dalam rangka memperkenalkan keragaman agama dan suku bangsa dilakukan oleh SD Al-Muhajirin. Kegiatan dimaksud dilakukan ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. Di tempat tersebut, para siswa dapat melihat miniatur berbagai aspek keragaman yang ada di Indonesia—terutama keragaman agama dan budaya—dalam bentuk rumah-rumah ibadah dan bangunan-bangunan khas kedaerahan.

Selain berbagai praktik yang diuraikan di atas, terungkap bahwa beberapa sekolah—terutama sekolah negeri—mengidentifikasi hal-hal lain yang dianggap berkontribusi terhadap penumbuhan nilai toleransi dan penghormatan keragaman agama, yang tampaknya sudah berlaku umum di sekolah-sekolah di Indonesia. Hal-hal tersebut yaitu program penguatan pendidikan karakter, materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta perayaan hari besar nasional. Dengan keberadaan ketiga hal tersebut, isu toleransi dan keragaman dipandang sudah menjadi sesuatu yang inheren dalam pendidikan di Indonesia dan seharusnya tidak menjadi isu yang menonjol atau memerlukan penanganan khusus.

B. PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI SEKOLAH-SEKOLAH DI DEPOK

Sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan DKT di Kota Depok terdiri atas sekolah-sekolah negeri dan swasta, dari jenjang SD dan SMP. Sekolah-sekolah negeri diwakili oleh SDN Anyelir 1, SDN Depok Baru 2, SDN Mekar Jaya 13, SMPN 2 Depok, SMPN 10 Depok, dan SMPN 3 Depok.

Sementara sekolah-sekolah swasta diwakili oleh SDIT Pondok Duta, SMPIT Nurul Fikri, SDIT Nurul Fikri, dan SMPIT Darul Abidin. Selain itu, ada SDIT Miftahul Ulum yang tidak sempat ikut DKT tetapi pernah dikunjungi dan salah seorang gurunya pernah diwawancarai.

Ragam praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah-sekolah di Kota Depok dapat dikelompokkan menjadi praktik di sekolah negeri dan praktik di sekolah swasta. Ragam praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah negeri yaitu berupa: pemberian kesempatan untuk melakukan peribadahan atau pendalaman materi keagamaan bagi setiap agama pada hari Jumat; pembauran komposisi siswa di kelas; pemutaran lagu-lagu kebangsaan di pagi hari; sistem subsidi silang pembiayaan kegiatan; pemberian santunan lintas agama; fasilitasi kegiatan wisata rohani bagi setiap siswa sesuai agama masing-masing; dan kerja sama lintas agama dalam kegiatan keagamaan.

Pemberian kesempatan untuk melakukan pembiasaan peribadahan atau pendalaman materi keagamaan bagi setiap agama pada hari Jumat dilaksanakan oleh SDN Anyelir 1. Dalam hal ini, SDN Anyelir 1 memberikan kesempatan kepada para siswanya yang beragama Kristen untuk melakukan pembiasaan ibadah atau memperdalam materi keagamaan mereka di bawah bimbingan salah satu guru mereka yang beragama Kristen. Kegiatan tersebut dilakukan pada hari Jumat di pagi hari ketika para siswa yang beragama Islam melaksanakan salat duha, dalam rangka penanaman karakter religius. Namun, karena keterbatasan sumber daya manusia, SDN Anyelir 1 tidak dapat memberikan kesempatan yang serupa kepada siswanya yang beragama selain Kristen.

Pembauran komposisi siswa di kelas dilakukan oleh SDN Depok Baru 2 dan SMPN 10 Depok. Hal tersebut merupakan aturan tidak tertulis yang isinya bertujuan agar komposisi siswa di kelas dan di kelompok-kelompok siswa dalam kelas beragam secara agama. Secara umum, itu dilakukan untuk memastikan pembauran. Namun, SDN Depok Baru 2 menerapkan aturan itu juga dalam rangka menjalankan ide tentang tutor sebaya, yaitu agar

siswa yang menonjol secara akademik dapat membantu teman-temannya yang membutuhkan.

Pemutaran lagu-lagu kebangsaan di pagi hari dilakukan oleh SMPN 2 Depok. Lagu-lagu tersebut diputar sebelum dimulainya jam pelajaran, yaitu sekitar pukul 6.15, selama kira-kira 30 menit. Tujuan dari pemutaran lagu-lagu itu adalah untuk memupuk rasa nasionalisme, yang mengimplikasikan penghargaan terhadap keragaman bangsa Indonesia.

Sistem subsidi silang pembiayaan kegiatan dilaksanakan di SMPN 3 Depok. Subsidi ini biasanya dibutuhkan untuk mengikuti kegiatan yang membutuhkan biaya yang tidak ditanggung oleh pihak sekolah, misalnya *study tour*. Pemberian subsidi ini dilakukan secara lintas agama, diberikan kepada setiap siswa yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang agamanya.

Pemberian santunan anak yatim lintas agama dilakukan oleh SMPN 3 Depok. Kegiatan ini mengambil momentum bulan Muharam, di mana biasanya umat Islam membiasakan bersedekah kepada anak yatim. Dalam peringatan Muharam tersebut, para siswa memberikan santunan kepada anak yatim, termasuk kepada anak yatim yang bukan beragama Islam.

Fasilitasi kegiatan wisata rohani bagi setiap siswa sesuai agamanya masing-masing dilakukan oleh SMPN 3 Depok dan SMPN 10 Depok. Kegiatan wisata rohani biasanya mengunjungi tempat atau tokoh yang dianggap bermakna atau penting secara keagamaan, misalnya dalam kasus siswa yang beragama Islam yaitu Pondok Pesantren Darut Tauhid asuhan KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) di Bandung. Dalam kasus SMPN 10 Depok, di saat siswa yang beragama Islam mengunjungi pesantren Aa Gym, para siswa beragama Kristen diberikan untuk mengunjungi tempat religius sesuai dengan tradisi mereka.

Kerja sama lintas agama dalam kegiatan keagamaan dilakukan oleh SMPN 3 Depok. Dalam kasus tersebut, kegiatan keagamaan yang dimaksud yaitu acara buka puasa bersama yang dikoordinir oleh OSIS sekolah yang bersangkutan. Penyelenggaraan acara tersebut juga

melibatkan para siswa yang bukan beragama Islam dalam hal persiapan dan pelaksanaannya.

Adapun ragam praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah swasta di Depok yaitu berupa: pesta budaya; ekstrakurikuler tarian daerah; perayaan puncak tema nusantara; *field trip* ke tempat-tempat yang menggambarkan keragaman; program *homestay*; bakti sosial lintas agama; dan program magang.

Kegiatan pesta budaya dilaksanakan di SDIT Pondok Duta, SMPIT Nurul Fikri, dan SDIT Miftahul Ulum. Acara tersebut pada dasarnya merupakan ekshibisi keragaman tradisi suku-suku bangsa yang ada di Indonesia; misalnya pakaian, tarian, dan makanan. Ekshibisi bisa disertai dengan presentasi, seperti dilakukan di SDIT Pondok Duta. Di SDIT Pondok Duta dan SMPIT Nurul Fikri, acara ini dilangsungkan setahun sekali, yaitu pada akhir tahun ajaran. Adapun di SDIT Miftahul Ulum, kegiatan ini dilaksanakan setahun dua kali, yaitu setiap akhir semester. Kegiatan pesta budaya dianggap berperan dalam pengenalan siswa terhadap berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia.

Ekstrakurikuler tarian daerah disediakan di SDIT Pondok Duta. Di antara tarian daerah yang diajarkan yaitu tari Saman dan tari khas Jawa Barat. Selain memfasilitasi latihan, sekolah juga menyediakan acara pementasan, biasanya disesuaikan dengan agenda sekolah, misalnya ketika akhir semester atau akhir tahun ajaran. Dengan mempelajari berbagai tarian daerah, diharapkan siswa dapat memahami adanya budaya yang berbeda dari daerah mereka tinggal sekarang. Sebagai akibatnya, kesadaran akan keragaman budaya akan tertanam melalui kegiatan ini.

Perayaan puncak tema nusantara diselenggarakan di SMPIT Nurul Fikri. Hal tersebut sesuai dengan tema keberagaman atau tema nusantara yang menjadi bagian dari Kurikulum 2013. Puncak tema nusantara untuk kelas 1 hingga 3 dirayakan dengan acara ekshibisi

tradisi suku bangsa yang ada di Indonesia; misalnya pakaian, lagu, dan makanan khas suku bangsa tertentu. Pemilihan tradisi suku bangsa yang akan ditampilkan biasanya disesuaikan dengan suku bangsa orang tua siswa. Adapun untuk kelas 4 hingga 6, puncak tema nusantara dilakukan dengan kegiatan yang lebih “akademik”, di mana para siswa diminta untuk menuliskan perasaan mereka dalam menghadapi teman-teman yang berbeda latar belakang agama dan suku bangsa.

Field trip ke tempat yang menggambarkan keragaman dilakukan oleh SMPIT Darul Abidin dan SDIT Miftahul Ulum. SMPIT Darul Abidin mengajak siswa ke TMII, sementara SDIT Miftahul Ulum membawa siswa untuk mengunjungi museum. TMII dan museum merupakan tempat untuk melihat contoh-contoh keragaman yang ada di Indonesia, termasuk keragaman agama, karena di sana ada biasanya terdapat berbagai miniatur serta informasi tentang berbagai macam agama dan budaya. Namun, kegiatan tersebut tidak rutin, karena kegiatan *field trip* juga dilaksanakan untuk kepentingan lain, misalnya bakti sosial.

Program *homestay* dilaksanakan oleh SMPIT Darul Abidin. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan tahunan. Ada dua kegiatan yang serupa dengan kegiatan *homestay* ini, yaitu program Darbin (baca: Darul Abidin) Lintas Dunia dan Darbin Lintas Daerah. Pelaksanaan Darbin Lintas Dunia yaitu program kunjungan dan *homestay* ke luar negeri. Sejak tahun 2004, SMPIT Darul Abidin telah melaksanakan kunjungan ke Singapura, Malaysia, Korea, dan Jepang. Sementara program *homestay* baru terwujud di tahun 2016 dan 2017, yaitu di Kota Perth, Australia. Dalam kunjungan ke luar negeri, para siswa diajak untuk mendatangi tempat-tempat terkenal (*landmark*) yang ada di kota yang didatangi serta mengunjungi sekolah-sekolah yang memiliki kerja sama dengan SMPIT Darul Abidin. Dalam kunjungan tersebut, setiap siswa diberikan tantangan untuk

berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang. Sementara itu, dalam program *homestay*, para siswa mau tidak mau harus tinggal bersama keluarga (*host family*) yang kemungkinan besar tidak beragama Islam, karena *homestay* dilakukan di negara-negara berpenduduk mayoritas non-Muslim. Meskipun sudah ada kesepahaman antara orang tua asuh dengan para siswa tentang batasan-batasan yang mengatur seorang Muslim, para siswa harus bisa menghadapi lingkungan yang mungkin tidak mendukung kehidupannya sebagai seorang Muslim. Adapun pelaksanaan program Darbin Lintas Daerah diwujudkan dalam kegiatan “Jelajah Kampung.” Dalam kegiatan tersebut, para siswa diharuskan tinggal di rumah orang tua asuh, yang kemungkinan besar berbeda latar belakang sosial-ekonominya dengan diri mereka.

Program magang diselenggarakan oleh SMPIT Darul Abidin. Dalam kegiatan ini, siswa harus siap berhadapan dengan perusahaan tempatnya magang dan dengan para pelanggan yang sudah tentu beragam. Sejauh ini, tempat magang yang menjadi tujuan biasanya berupa restoran atau kedai kopi. Tidak ada kriteria khusus dalam memilih tempat magang, karena biasanya didasari atas negosiasi antara pihak sekolah dengan perusahaan.

Bakti sosial lintas agama dilaksanakan oleh SDIT Miftahul Ulum dan SDIT Nurul Fikri. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan dengan membagikan santunan ketika mengunjungi panti sosial atau panti jompo. Santunan diberikan kepada para penghuni panti tanpa melihat latar belakang agama dan budaya mereka. Kegiatan tersebut dilaksanakan setahun sekali, biasanya pada akhir tahun ajaran.

C. PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI SEKOLAH-SEKOLAH DI YOGYAKARTA

Sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan DKT di Kota Yogyakarta terdiri atas sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah swasta,

yang semuanya berasal dari jenjang SMA. Sekolah-sekolah negeri yang hadir yaitu SMAN 1 Yogyakarta dan SMAN 3 Yogyakarta. Adapun sekolah-sekolah swasta yang hadir yaitu SMA Tumbuh, Sekolah Olifant, SMA BOPKRI 1, SMA PIRI 1, dan SMA Budi Mulia Dua.

Ragam praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah-sekolah di Yogyakarta dapat dikelompokkan menjadi praktik di sekolah negeri dan praktik di sekolah swasta. Berbagai praktik yang ada di sekolah negeri berupa: fasilitasi pembiasaan ibadah dan pendalaman ajaran keagamaan bagi setiap siswa sesuai agama masing-masing; pelayanan kebutuhan peribadahan setiap siswa sesuai agamanya dalam penyelenggaraan acara sekolah; penyediaan fasilitas ibadah dan pembelajaran agama bagi setiap siswa sesuai dengan agamanya masing-masing; dialog personal dengan siswa yang diduga terpapar radikalisme; dialog di antara guru-guru yang berbeda agama mengenai toleransi; fasilitasi perayaan hari besar keagamaan siswa sesuai agama masing-masing; dan penyelenggaraan acara keagamaan yang inklusif.

Fasilitasi pembiasaan ibadah dan pendalaman ajaran keagamaan bagi setiap siswa sesuai dengan agama masing-masing dilakukan oleh SMAN 1 Yogyakarta dan SMAN 3 Yogyakarta. Di SMAN 1 Yogyakarta, kegiatan yang diselenggarakan yaitu penyampaian materi keagamaan bagi setiap siswa sesuai agama masing-masing setiap hari Jumat, tepatnya pada pagi hari. Selain itu, secara khusus sekolah tersebut juga memfasilitasi kegiatan retreat para siswa yang beragama Kristen, melalui anggaran kegiatan OSIS dan subsidi dari anggaran sekolah. Di SMAN 3, kegiatan yang dilaksanakan yaitu fasilitasi penyelenggaraan acara keagamaan, misalnya ekaristi di lapangan sekolah.

Pelayanan kebutuhan peribadahan setiap siswa sesuai agamanya dalam penyelenggaraan acara sekolah dilakukan oleh SMAN 1 Yogyakarta. Di sekolah tersebut, ada kegiatan bernama “Perkemahan Bakti Teladan” yang dilaksanakan setiap tahun, sebagai bentuk bakti terhadap masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dipilih tempat atau lokasi yang memiliki atau berdekatan dengan sarana peribadahan untuk setiap agama

yang dianut siswa sehingga mereka dapat menjalankan ibadah dengan baik selama menjalani kegiatan perkemahan.

Penyediaan fasilitas ibadah dan pembelajaran agama bagi setiap siswa sesuai dengan agamanya masing-masing dilaksanakan oleh SMAN 1 Yogyakarta dan SMAN 3 Yogyakarta. Di SMAN 1 Yogyakarta, sudah ada musala sejak lama dan telah menjadi masjid yang dapat dipakai untuk salat Jumat bagi para siswa dan guru-guru yang beragama Islam. Selain itu, ada juga ruang kelas khusus untuk pembelajaran agama Kristen dan agama Katholik, dengan fasilitasnya masing-masing. Masjid difungsikan sebagai bagian dari sekretariat organisasi ROHIS, sementara ruang belajar agama Kristen dan Katolik juga difungsikan sebagai sekretariat organisasi ROKRIS (organisasi keagamaan siswa beragama Kristen) dan ROKAT (organisasi keagamaan siswa beragama Katolik).

Dialog personal dengan siswa yang diduga terpapar paham radikalisme dan intoleransi dilakukan oleh SMAN 1 Yogyakarta, khususnya oleh salah seorang guru Pendidikan Agama Islam di sekolah itu. Hal tersebut dilakukan sang guru karena ia melihat adanya gejala radikalisme dan intoleransi di antara para siswanya; sebagai contoh yaitu adanya siswa yang menolak Pancasila sebagai dasar negara serta siswa yang menyebut kawannya yang non-Muslim dengan sebutan “kafir” secara terang-terangan di sekolah.

Dialog di antara guru-guru yang berbeda agama mengenai toleransi dilakukan di SMAN 1 Yogyakarta, khususnya oleh salah seorang guru Pendidikan Agama Islam di sekolah itu dengan guru-guru beragama lainnya. Hal tersebut dilakukan atas inisiatif sang guru agama dalam rangka menyamakan persepsi tentang pentingnya toleransi di sekolah tempat mereka mengajar.

Fasilitasi perayaan hari besar keagamaan siswa sesuai agama masing-masing dilakukan oleh SMAN 3 Yogyakarta. Selain perayaan hari besar agama Islam, yang memang mayoritas, SMAN 3 Yogyakarta juga memfasilitasi perayaan hari besar agama lain. Sebagai contoh, fasilitasi keikutsertaan siswa dalam perayaan Waisak Nasional di kawasan Candi

Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.

Penyelenggaraan acara keagamaan yang inklusif dilakukan di SMAN 3 Yogyakarta. Acara dimaksud berjudul “Padmanaba Islamic Festival” (PIF). Meskipun acara tersebut diselenggarakan oleh siswa beragama Islam dan acaranya sebagian besar berkaitan dengan ke-Islam-an, tetapi gagasan tentang toleransi tetap diusung. Terutama dalam PIF tahun 2019, di mana tema yang diangkat yaitu “Luruskan Hati Kuatkan Toleransi”. Dalam pelaksanaannya, kegiatan dimaksud berisi acara lomba cerdas cermat, lomba azan, lomba mendongeng, lomba melukis, dan lomba membaca Al-Qur’an bagi siswa SD dan SMP se-Provinsi DI Yogyakarta. Di samping itu, acara tersebut juga berisi ceramah-ceramah keagamaan, yang di dalamnya bermuatan tentang pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keragaman di antara umat beragama.

Adapun ragam praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah-sekolah swasta di Yogyakarta yaitu berupa: penyediaan guru pendidikan agama bagi setiap agama yang dianut siswa; fasilitasi perayaan hari besar keagamaan setiap agama; kunjungan ke rumah ibadah agama yang berbeda-beda; pertemuan dialog antaragama; pembacaan doa lintas agama; pembekalan tentang visi keragaman untuk guru dan karyawan yang baru direkrut; rekrutmen guru tanpa memandang agama; pembauran siswa lintas agama dalam acara keagamaan tertentu; implementasi pendidikan agama yang menekankan persamaan antaragama; kerja sama dengan sekolah lain berkaitan dengan gagasan keragaman dan toleransi; dan modifikasi pelajaran pendidikan agama.

Fasilitasi perayaan hari besar keagamaan setiap agama diselenggarakan oleh SMA Tumbuh dan Sekolah Olifant. Perayaan hari besar tersebut dilaksanakan secara bersama-sama, lintas agama. Di SMA Tumbuh, perayaan hari besar keagamaan dilakukan setahun sekali secara bergantian menurut agama yang dianut siswa. Sebagai contoh, tahun ini yang dirayakan yaitu Galungan, tahun berikutnya

Natal, dan tahun berikutnya lagi Waisak. Sementara di Sekolah Olifant, perayaan hari besar setiap agama yang dianut siswa selalu dilaksanakan, termasuk perayaan tahun baru Imlek.

Kunjungan ke rumah ibadah agama yang berbeda-beda dilaksanakan oleh SMA Tumbuh dan SMA Budi Mulia Dua. Kegiatan ini berupa kunjungan ke tempat-tempat ibadah setiap agama yang ada di Indonesia. Di SMA Tumbuh, kunjungan ke tempat ibadah dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran. Demikian pula di Sekolah Olifant. Pertemuan dialog antaragama dilaksanakan di SMA Tumbuh dan Sekolah Olifant. Dialog yang dimaksud yaitu dialog di antara para siswa yang berbeda agama yang difasilitasi oleh guru agama tertentu. Di SMA Tumbuh, dialog tersebut dinamakan kelas *interreligious*, yang dilaksanakan dua hingga tiga pertemuan per pekan. Dalam kelas tersebut, setiap siswa diperbolehkan untuk bertanya apa saja mengenai agama lain selain yang dianutnya dengan tujuan melahirkan pemahaman bersama dan menghilangkan stigma negatif mengenai masing-masing agama. Di Sekolah Olifant, dialog antaragama terjadi baik di kelas maupun dalam sesi yang dinamakan *free time*, yaitu sesi diskusi lepas di sela-sela kegiatan pembelajaran. Pembacaan doa lintas agama dilaksanakan di Sekolah Olifant. Doa tersebut dinamakan “Doa Nusantara”. Dalam pelaksanaannya, naskah doa biasanya dibacakan oleh perwakilan guru, meskipun kadang-kadang juga dibacakan oleh perwakilan siswa. Pembekalan tentang visi keragaman untuk guru dan karyawan yang baru direkrut dilakukan oleh Sekolah Olifant. Visi keragaman yang dimaksud mencakup kondisi keragaman sekolah dan nilai-nilai yang hendak ditanamkan kepada para siswa. Termasuk di dalamnya yaitu pembahasan tentang isu-isu yang dianggap sensitif, misalnya terkait dengan isu SARA. Materi biasanya disampaikan oleh perwakilan Yayasan.

Rekrutmen guru tanpa memandang agama dilakukan oleh SMA

BOPKRI 1 dan SMA PIRI 1. Kedua sekolah tersebut pada dasarnya merupakan sekolah yang bernaung di bawah yayasan pendidikan dengan afiliasi keagamaan tertentu. SMA BOPKRI 1 milik sebuah yayasan pendidikan Kristen dan SMA PIRI 1 milik sebuah yayasan pendidikan Islam. Meskipun demikian, kedua sekolah tidak membatasi guru dan tenaga kependidikan di sekolah mereka pada orang-orang yang agamanya sesuai dengan afiliasi yayasannya. Sebagai contoh, SMA BOPKRI 1 memiliki guru dan tenaga kependidikan yang beragama Islam, Katolik, Hindu, dan Budha. Sementara SMA PIRI 1 pernah memiliki guru beragama Kristen dan Budha.

Pembauran siswa lintas agama dalam acara keagamaan tertentu terjadi di SMA BOPKRI 1. Pembauran tersebut misalnya terjadi dalam perayaan hari besar keagamaan dan peribadahan Kristen yang diselenggarakan oleh sekolah, yang memang berbasis agama Kristen. Setiap siswa terbiasa berbaur dalam kegiatan-kegiatan tersebut, bukan dalam rangka mengikuti ritual atau penanaman dogma tetapi dalam kerangka saling menghormati.

Implementasi pendidikan agama yang menekankan persamaan antaragama ada di SMA PIRI 1 dan SMA Budi Mulia Dua. Pendidikan agama di dua sekolah tersebut diarahkan pada nilai-nilai yang sama dalam setiap agama, dibandingkan menonjolkan perbedaannya. Secara khusus, di SMA Budi Mulia Dua, nama mata pelajarannya telah modifikasi menjadi “Universalisme Islam”.

Kerja sama dengan sekolah lain berkaitan dengan gagasan keragaman dan toleransi dilakukan oleh SMA BOPKRI 1. Dalam hal ini, sekolah tersebut bekerja sama dengan SMA Al-Izhar Jakarta dalam hal pertukaran gagasan tentang keragaman dan toleransi. Dalam pelaksanaannya, kedua sekolah telah saling mengunjungi dalam rangka studi banding dan mempererat persahabatan dua sekolah yang berbasis agama yang berbeda.

D. PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI SEKOLAH-SEKOLAH DI SEMARANG

Kegiatan DKT di Kota Semarang dihadiri oleh sekolah-sekolah negeri dan swasta, dari jenjang SD hingga SMA/ sederajat. Sekolah-sekolah negeri yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut yaitu SMAN 7 Semarang, SMAN 11 Semarang, SMAN 10 Semarang, SMAN 3 Semarang, SMPN 13 Semarang, SMPN 39 Semarang, SMPN 12 Semarang, SDN Sendang Mulyo, SDN Tandang 1, dan SDN Pendrikan Kidul. Sementara sekolah swasta yang berpartisipasi hanya ada satu, yaitu SMK Kanisius Ungaran, Kabupaten Semarang.

Ragam praktik pengelolaan keragaman agama di Semarang dapat dikategorikan menjadi praktik di sekolah negeri dan praktik di sekolah swasta. Praktik-praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah-sekolah negeri yaitu berupa: penyediaan ruang pembelajaran pendidikan agama bagi siswa yang mengikuti pelajaran pendidikan selain Pendidikan Agama Islam; penamaan ruang interaksi dengan nuansa keragaman; mengemas berbagai kegiatan dengan tema keragaman; fasilitasi kegiatan keagamaan setiap siswa sesuai agamanya masing-masing; kampanye anti radikalisme dan anti intoleransi; menonton bersama film bertema keragaman; penyampaian pesan tentang keragaman dalam berbagai kegiatan siswa; seleksi dan pengawasan terhadap kegiatan ROHIS; penyaluran donasi secara lintas agama; pengelolaan pengajian di masjid sekolah secara mandiri; deklarasi sekolah damai; saling mengunjungi di antara para guru dan kepala sekolah pada perayaan hari raya masing-masing agama yang dianut; dan penghapusan yel keagamaan yang membuat takut siswa lain.

Sebagai sekolah negeri, SMAN 7 dan SMAN 11 terdiri atas para siswa dengan agama yang beragam. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan agama, kedua sekolah tersebut tidak hanya menyediakan guru agama untuk setiap mata pelajaran agama yang dianut para siswa, tetapi juga ruang kelas untuk kegiatan pembelajaran, terutama untuk pendidikan agama selain Pendidikan Agama Islam. Se jauh ini, memang hanya tersedia

ruang kelas untuk Pendidikan Agama Kristen dan Pendidikan Agama Katolik, karena jumlah siswa non-Islam selain Kristen dan Katolik jumlah tidak menentu setiap tahunnya. Ruangan-ruangan tersebut juga berfungsi sebagai sekretariat organisasi ROKRIS dan ROKAT.

SMAN 7 dan SMAN 11 Semarang memiliki ruang interaksi warga sekolah berupa taman. Penamaan ruang interaksi tersebut bernuansa keragaman. SMAN 7 menamainya dengan “Taman Bhineka”, sementara SMAN 11 memberinya nama “Taman Nusantara”. Taman tersebut dibuat atas gagasan dari para siswa, khususnya yang tergabung dalam OSIS, ketika mereka mengimplementasikan program Sekolah Damai, sebuah program yang diinisiasi oleh Wahid Foundation. Kedua taman itu diharapkan dapat menjadi ruang perjumpaan para siswa dan warga sekolah yang berbeda-beda latar belakang, selain menjadi simbol budaya damai yang ada di kedua sekolah tersebut. Sebetulnya, tidak ada yang istimewa dari tampilan dan desain kedua taman tersebut. Penekanannya yaitu pada penamaan yang mengusung tema keragaman, yang seolah menyatakan bahwa taman tersebut merupakan tempat di mana setiap siswa dari berbagai latar belakang bisa berinteraksi dan berbaur.

Masih terkait dengan program Sekolah Damai, SMAN 7, SMAN 10, dan SMAN 11 Semarang mengemas berbagai program dan kegiatan yang mereka selenggarakan dengan tema keragaman. Sebagai contoh, SMAN 7, SMAN 10, dan SMAN 11 memiliki program pembuatan majalah dinding, lomba komik, lomba poster berisi kutipan kalimat bijak (*quote*), lomba mural, lomba poster, dan diorama bertema keragaman. Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan pada momentum peringatan hari-hari tertentu, misalnya perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) dan Hari Literasi.

Selaku sekolah yang menaungi warga yang beragam secara agama, SMAN 3, SMAN 7, SMAN 11, SMPN 39 Semarang, dan SDN Sendang Mulyo memfasilitasi kegiatan keagamaan setiap siswa sesuai agamanya masing-masing. Kegiatan keagamaan yang dimaksud di antaranya yaitu kegiatan

reatret dan berdoa bersama. Kegiatan reatret dilaksanakan oleh para siswa dan warga sekolah yang beragama Kristen dan Katolik. Adapun kegiatan berdoa bersama biasa dilakukan oleh semua agama. Kegiatan berdoa bersama ini biasanya dilakukan ketika akan menghadapi Ujian Nasional. Sekolah-sekolah tersebut memfasilitasi kegiatan *istigosah*, acara berdoa bersama, para siswa beragama Islam, serta acara berdoa bersama agama lain sesuai ajarannya masing-masing.

Sebagai sekolah dampingan program Sekolah Damai, SMAN 10 dan SMAN 11 Semarang gencar melakukan kampanye anti radikalisme dan anti intoleransi. Kedua sekolah tersebut memasang spanduk yang berisikan tulisan atau ekspresi penolakan terhadap radikalisme dan intoleransi. Spanduk dimaksud biasanya dipajang di bagian depan sekolah. Selain itu, sekolah-sekolah tersebut, ditambah SMAN 7 Semarang, terus menyampaikan pesan-pesan tentang kedamaian dan penghormatan terhadap keragaman dalam berbagai momentum, misalnya pada saat upacara bendera, masa orientasi siswa, latihan dasar kepemimpinan bagi pengurus OSIS, dan perkemahan siswa.

SMAN 7 Semarang memiliki program menonton bersama film bertema keragaman. Kegiatan menonton bersama di sekolah tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2018. Selama ini, kegiatan tersebut dilakukan pada waktu bulan Ramadan. Dalam pelaksanaannya, ada orasi bertema perdamaian sebelum pemutaran film. Salah satu film yang ditayangkan dalam acara tersebut berjudul “My Name is Khan”, sebuah film produksi India yang bercerita tentang kehidupan Muslim India di Amerika Serikat.

SMAN 7, SMAN 10, dan SMAN 11 Semarang memahami bahwa dalam konteks Indonesia, di mana Muslim merupakan mayoritas, ada peluang merebaknya fundamentalisme agama di kalangan siswa. Salah satu pintu masuknya yaitu kegiatan organisasi ROHIS. Sehubungan dengan hal itu, sekolah-sekolah tersebut melakukan pengawasan dan seleksi terhadap kegiatan ROHIS, termasuk di dalamnya yaitu seleksi dan pengawasan terhadap para pembicara dari luar lingkungan sekolah serta berbagai

kegiatan yang melibatkan pihak eksternal sekolah. Para guru agama, selaku Pembina ROHIS, benar-benar terjun langsung untuk membina ROHIS agar kegiatan mereka tidak mengarah kepada hal-hal yang dianggap negatif.

Beberapa sekolah membiasakan para siswanya untuk menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Lebih dari itu, penyaluran santunan tidak didasarkan pada kriteria agama atau apapun, hanya semata-mata kemanusiaan. Praktik seperti itu ada di SMAN 7, SMAN 11, SMPN 19, dan SMP 12 Semarang, serta SDN Pendrikan Kidul. Khusus untuk SMAN 7, ada nama khusus untuk kegiatan dimaksud, yaitu “Dana Maslahat”, yang dalam pelaksanaannya bisa berupa pemberian modal usaha. Santunan yang dibagikan tidak terbatas pada uang, tetapi juga barang, misalnya pakaian, buku, dan perlengkapan sekolah.

Dalam rangka memastikan bahwa para siswa tidak terpengaruh oleh ideologi yang dianggap radikal dan intoleran, guru Pendidikan Agama Islam SMAN 7 Semarang terjun langsung dalam mengisi pengajian-pengajian di masjid sekolah. Sang guru agama, yang juga pembina ROHIS SMAN 7, menggunakan kitab-kitab yang dianggap moderat dalam pengajian-pengajian tersebut. Jadwal pengajian siswa di masjid SMAN 7 yaitu setiap Selasa pagi, antara pukul 6.00 hingga 6.45 WIB, bagi siswa kelas X, dengan materi hadis dari kitab “Riyadlus Shalihin”; serta setiap Jumat pagi, di waktu yang sama, untuk kelas XI, dengan materi tafsir yang merujuk pada kitab-kitab “Tafsir Al-Ibriz”, “Tafsir Ibnu Katsir”, dan “Tafsir Jalalain”.

Di awal-awal implementasi program Sekolah Damai, SMAN 7 Semarang melaksanakan deklarasi sekolah damai. Dalam deklarasi tersebut, ada pesan damai yang disampaikan oleh masing-masing guru agama Islam, Kristen, dan Katolik. Setelah itu, semua orang berjabat tangan. Tujuan dari hal itu adalah agar semua warga sekolah mempunyai *mindset* yang menerima dan menghargai perbedaan.

Para siswa dan guru SDN Pendrikan Kidul memiliki kebiasaan pembauran di antara penganut agama yang berbeda. *Pertama*, para guru termasuk kepala sekolahnya terbiasa saling mengunjungi di

antara sesama mereka pada saat perayaan hari raya masing-masing agama yang dianut. Sebagai contoh, sang kepala sekolah beragama Kristen, maka merayakan Natal. Pada saat hari Natal, para guru berdatangan ke rumah sang kepala sekolah; dan begitu pula sang kepala sekolah, akan mengunjungi rumah para guru pada saat perayaan hari raya masing-masing agama. *Kedua*, sang kepala sekolah, meskipun beragama Kristen, tetap terjun dalam pembinaan ekstrakurikuler rebana, yang sebetulnya identik dengan kesenian bernuansa Islam.

Pada suatu masa, para siswa beragama Islam di SDN Tandang 1 memiliki yel bernuansa Islami yang biasa mereka teriakkan di waktu-waktu tertentu. Namun, dalam perkembangannya, ada seorang siswa baru, yang kebetulan beragama non-Islam, yang merasa ketakutan dengan yel tersebut. Akhirnya, pihak sekolah memutuskan untuk menghapus yel keagamaan tersebut, setelah bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terkait.

Adapun ragam kegiatan pengelolaan keragaman agama di sekolah swasta di Semarang, dalam hal ini yaitu SMK Kanisius Ungaran, yaitu berupa: perayaan hari besar keagamaan secara bersama-sama; pemberian kesempatan menunaikan ibadah sesuai agama masing-masing; penyediaan sarana dan prasarana ibadah; ekstrakurikuler rebana (kasidah); dan keikutsertaan dalam acara-acara bertema keragaman.

SMK Kanisius Ungaran biasa merayakan berbagai hari besar keagamaan yang berbeda-beda secara bersama-sama dan secara lintas agama. Sebagai contoh yaitu perayaan Natal dan Paskah. Di samping itu, momentum lain juga biasa dirayakan atau disemarakkan bersama, misalnya acara buka puasa bersama dan halal bihalal setelah libur Idul Fitri.

Setiap siswa SMK Kanisius diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Misalnya

yaitu untuk siswa beragama Islam, yang diberikan waktu untuk melaksanakan salat, terutama salat zuhur dan salat Jumat. Terkait dengan hal tersebut, SMK Kanisius Ungaran menyediakan sarana dan prasarana ibadah salat berupa ruangan, sajadah, dan mukena.

Sebagai sebuah sekolah yang berada di bawah yayasan pendidikan Katolik, SMK Kanisius memfasilitasi ekstrakurikuler yang bernuansa ke-Islam-an, yaitu ekstrakurikuler rebana atau kasidah. Dalam perkembangannya, karena kekurangan personel, siswa yang beragama non-Islam pun turut serta dalam grup rebana SMK Kanisius Ungaran. Lagu-lagu yang biasa dibawakan oleh grup rebana tersebut, yang pada dasarnya adalah lagu rohani Islam dan selawat, di antaranya berjudul “Ya Badrotin” dan “Syair Lir Ilir Sunan Kalijaga”. Jadwal latihan ekstrakurikuler rebana tersebut yaitu setiap hari Kamis, setelah selesai kegiatan pembelajaran di kelas.

Adapun sebagai wadah apresiasi, grup rebana SMK Kanisius Ungaran biasa tampil dalam rangka meramaikan acara-acara di sekolah serta kegiatan-kegiatan eksternal bertema lintas agama, misalnya pertemuan bertajuk “Pertemuan Wanita Berhijab” dan kegiatan buka puasa bersama dengan Sinta Nuriyah³. “Pertemuan Wanita Berhijab” merupakan forum pertemuan para wanita yang mengenakan penutup kepala dari berbagai agama, bukan hanya Islam. Sementara acara buka puasa bersama dengan Sinta Nuriyah merupakan agenda pertemuan lintas agama yang biasa dilakukan oleh sang mantan ibu negara.

E. PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI SEKOLAH-SEKOLAH DI MEDAN

Sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan DKT di Kota Medan terdiri atas sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah swasta, dari

3 Sinta Nuriyah merupakan istri dari mendiang Abdurrahman Wahid atau Gusdur, presiden RI ke-4, yang aktif dalam mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap keragaman.

jenjang SD hingga SMA. Sekolah-sekolah negeri yang hadir yaitu SMAN 1 Medan dan SMAN 2 Medan. Sementara sekolah-sekolah swasta yang hadir yaitu SD Sultan Iskandar Muda, SMP Sultan Iskandar Muda, SMA Sultan Iskandar Muda, serta SMA Santo Thomas 1.

Ragam praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah-sekolah di Medan dapat dikelompokkan menjadi praktik-praktik di sekolah negeri dan praktik-praktik di sekolah swasta. Praktik-praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah-sekolah negeri yaitu berupa: penyediaan ruang pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama selain Pendidikan Agama Islam; fasilitasi kegiatan keagamaan setiap siswa sesuai agamanya masing-masing; dan pengawasan kegiatan keagamaan siswa.

Sebagai sebuah sekolah negeri, SMAN 1 Medan menaungi para siswa yang beragam, termasuk dari segi agama. Sehubungan dengan hal tersebut, SMAN 1 Medan menyediakan ruang pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama selain Pendidikan Agama Islam. Dalam hal ini, ruangan yang disediakan yaitu untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Pendidikan Agama Katolik. Ruangan tersebut, selain digunakan untuk kelas mata pelajaran agama, juga digunakan untuk kegiatan keagamaan siswa Kristen dan Katolik.

Masih terkait dengan komposisi siswanya yang beragam secara agama, SMAN 1 Medan memfasilitasi kegiatan keagamaan setiap siswa sesuai agamanya masing-masing. Sebagai contoh, sekolah memfasilitasi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW serta kegiatan retret para siswa beragama Kristen dan Katolik. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang ada kerja sama lintas agama, misalnya siswa non-Muslim yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan perayaan Maulid.

SMAN 1 Medan melihat bahwa, meskipun selama ini tidak ada pengalaman yang terkait dengan radikalisme dan intoleransi di sekolah tersebut, diperlukan pengawasan terhadap kegiatan keagamaan yang diselenggarakan siswa agar tidak disusupi oleh kepentingan dan ideologi yang bertentangan dengan negara, termasuk yang anti keragaman. Untuk

itu, sekolah tersebut melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan ROHIS dan kegiatan keagamaan lain. Salah satu caranya yaitu dengan memantau profil tokoh agama yang akan mengisi acara keagamaan di sekolah maupun profil acara keagamaan yang akan diikuti oleh siswa.

Adapun ragam praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah swasta di Medan yaitu berupa: pemenuhan pendidikan agama siswa; penanaman tentang nilai penghormatan terhadap keragaman pada masa orientasi siswa dan guru baru; pembauran komposisi siswa di kelas berdasarkan agama dan suku; fasilitasi pendalaman materi pembelajaran keagamaan; doa lintas agama; penyediaan rumah ibadah masing-masing agama; donasi lintas agama; penyelenggaraan *event* selebrasi keragaman (Malam Bhineka Tunggal Ika); penyelenggaraan kelas keberagaman; penyelenggaraan aneka lomba yang diikuti sekolah yang beragam afiliasi keagamaannya; dan pembauran siswa dalam acara keagamaan.

Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda (YPSIM) menegaskan diri sebagai lembaga yang ingin menghadirkan sekolah-sekolah yang multikultur. Dalam rangka itu, sekolah-sekolah yang dinaunginya, dari mulai SD hingga SMA, berusaha untuk memenuhi pendidikan agama setiap siswanya sesuai dengan agamanya masing-masing. Guru untuk setiap mata pelajaran pendidikan agama disediakan. Pengecualian yaitu untuk agama Sikh, tidak disediakan guru untuk agama tersebut karena memang tidak tersedia. Biasanya, para siswa beragama Sikh bersedia untuk ikut kelas Pendidikan Agama Hindu atau Kristen.

Sehubungan dengan upayanya untuk melayani setiap agama yang dianut siswanya, sekolah-sekolah Sultan Iskandar Muda juga menyediakan rumah ibadah untuk masing-masing agama. Rumah-rumah ibadah yang tersedia di kompleks sekolah Iskandar Muda yaitu masjid, gereja, wihara, dan pura. Selain menjadi tempat ibadah, rumah-rumah ibadah itu juga menjadi tempat pendalaman agama dan tempat bersosialisasi para siswa dan warga sekolah.

Meskipun menekankan nilai toleransi dan penghormatan terhadap

keragaman, tidak berarti bahwa sekolah-sekolah Sultan Iskandar Muda memfasilitasi pendidikan agama seadanya. Sekolah-sekolah itu justru memfasilitasi pendalaman materi pembelajaran keagamaan di luar kelas, atau di luar jam pelajaran pendidikan agama. Pendalaman materi itu misalnya program membaca Al-Qur'an bagi para siswa Muslim dan pendalaman Alkitab bagi siswa beragama Kristen.

Untuk menyeimbangkan antara pemahaman agama masing-masing dengan pemahaman dan penghormatan terhadap keragaman, sekolah-sekolah Sultan Iskandar Muda menyelenggarakan kelas keberagaman. Kelas tersebut merupakan bagian dari mata pelajaran pendidikan agama. Dalam pelaksanaannya, kelas keberagaman mengumpulkan setiap siswa dari kelas pendidikan agama yang berbeda-beda di sebuah auditorium, yang bernama Auditorium Bung Karno. Dengan dipandu oleh para guru masing-masing agama, para siswa berdiskusi mengenai berbagai tema universal yang ada di setiap agama, misalnya tema tentang kasih. Meskipun membicarakan hal-hal yang dianggap sama di antara setiap agama, para guru agama memastikan bahwa apa yang disampaikan tidak menyalahi ajaran agama masing-masing, atau tidak praktik mencampurkan ajaran agama yang berbeda-beda.

Dalam rangka membiasakan siswa untuk berinteraksi dengan teman yang berbeda-beda latar belakang, sekolah-sekolah Sultan Iskandar Muda memiliki kebijakan pembauran komposisi siswa di kelas berdasarkan agama dan suku. Penekanannya yaitu keterwakilan setiap agama dan suku dalam setiap kelas. Lebih jauh lagi, tempat duduk siswa pun diupayakan ada pembauran, sehingga teman sebangku seorang siswa diupayakan adalah yang berbeda latar belakang dengannya.

Sekolah-sekolah Sultan Iskandar Muda ingin menghilangkan pembedaan mayoritas dan minoritas. Untuk itu, dalam hal pembacaan doa, semua agama diakomodasi. Secara khusus, dalam upacara bendera pada hari Senin, yang dibacakan yaitu doa lintas agama. Pembacaan

doa dilakukan oleh perwakilan siswa, secara bergantian berdasarkan agama yang berbeda-beda. Selain itu, dalam acara para guru juga diberlakukan doa lintas agama.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap setiap tradisi agama dan budaya setiap siswa, sekolah-sekolah Sultan Iskandar Muda menyelenggarakan *event* selebrasi keragaman yang dinamakan Malam Perayaan Bhinneka Tunggal Ika. Acara tersebut merupakan kegiatan tahunan. Dalam acara tersebut, setiap siswa diberi kesempatan untuk menampilkan kekayaan budaya mereka masing-masing. Bentuknya berupa pentas seni-budaya, termasuk kuliner.

Dalam sejarahnya, pembangunan masjid di kompleks sekolah Sultan Iskandar Muda merupakan hasil donasi lintas agama. Artinya, orang dari berbagai latar belakang telah berkontribusi secara material dalam pembangunan masjid itu. Dalam perjalanannya, pembangunan rumah ibadah lainnya juga demikian. Hingga kini, kebiasaan memberikan donasi untuk kepentingan bersama masih berlangsung. Tersedia wadah penampung donasi yang ditempatkan di dekat pintu masuk sekolah.

YPSIM melihat bahwa ada kemungkinan para warga sekolah yang baru, yaitu siswa dan guru baru, belum memiliki pandangan yang sama mengenai toleransi dan keragaman. Oleh karena itu, sekolah-sekolah Sultan Iskandar Muda melakukan penanaman nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap keragaman pada masa orientasi siswa dan guru baru. Bahkan ada juga pelatihan secara rutin bagi para guru terkait hal tersebut.

SMA Santo Thomas 1 merupakan sekolah yang bernaung pada sebuah yayasan pendidikan Katolik. Salah satu upaya sekolah tersebut dalam mengelola keragaman yaitu dengan menyelenggarakan STOSA (Santo Thomas Satu) Cup, yaitu aneka perlombaan yang diikuti oleh sekolah-sekolah yang beragam, termasuk dalam hal afiliasi keagamaannya. Sebagai contoh, lomba basket yang diikuti oleh

sekolah berbasis yayasan pendidikan Islam, serta lomba Bahasa Inggris yang pernah dimenangkan oleh peserta dari sekolah yang juga berbasis yayasan pendidikan Islam.

Sebagai sekolah Katolik, pada dasarnya kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di SMA Santo Thomas 1 yaitu kegiatan keagamaan bernuansa Katolik. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi pembauran siswa dalam berbagai acara dimaksud. Sebagai contoh, ada siswa beragama Islam yang ikut kegiatan retreat. Biasanya ketertarikan seperti itu terkait dengan daya tarik suasana tempat retreat yang memang menarik, biasanya di pedalaman agar sepi sehingga kondusif untuk kegiatan retreat. Siswa tersebut tidak serta merta diizinkan oleh sekolah, melainkan harus dengan pengetahuan dan persetujuan dari orang tuanya.

F. RAGAM PRAKTIK PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI SEKOLAH

Berbagai uraian di atas telah mengungkapkan bahwa praktik pengelolaan keragaman agama yang dilakukan oleh sekolah-sekolah sangat beragam. Secara umum, ada sekolah-sekolah—terutama sekolah negeri—yang cenderung normatif dalam pengelolaan keragaman. Sekolah-sekolah tersebut mengandalkan materi yang ada dalam mata pelajaran PPKn serta program penguatan pendidikan karakter. Namun, ada sekolah-sekolah tertentu yang memiliki praktik yang patut mendapatkan perhatian, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 2.

Tabel 2. Ragam Praktik Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah

Aspek	Contoh Praktik
Kurikulum	Modifikasi materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan penyediaan kelas <i>interreligious education</i>
Ekstrakurikuler	Ekskul rebana yang diikuti siswa lintas agama di salah satu SMK Katolik di Semarang atau fasilitasi kegiatan rohani bagi setiap ekskul keagamaan

Aspek	Contoh Praktik
Kokurikuler	Program <i>homestay</i> dan kunjungan ke museum
Sarana dan prasarana	Penyediaan musala di beberapa sekolah Katolik dan Kristen, penyediaan ruang belajar pendidikan agama non-PAI, dan pembuatan taman sebagai ruang simbol keragaman
Pengelolaan kelas	Pembuatan kontrak siswa, doa lintas agama, dan pembauran komposisi siswa di kelas
Rekrutmen GTK	Sekolah-sekolah swasta dengan basis agama tertentu merekrut GTK yang agamanya berbeda-beda dengan afiliasi agama yayasan (misalnya sekolah beryayasan Katolik merekrut GTK beragama Islam)
Acara selebrasi	Festival seni-budaya
Aksi sosial	Donasi lintas agama dan subsidi silang antar siswa yang berbeda agama

Sumber: Hasil olah data.

Tabel 2 memaparkan delapan aspek yang menjadi sasaran dalam pengelolaan keragaman agama di sekolah, berdasarkan temuan penelitian yang diuraikan di bagian terdahulu. *Pertama*, praktik pengelolaan keragaman agama itu ada yang berkaitan dengan kurikulum. Sebagai contoh yaitu modifikasi materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan penyediaan kelas *interreligious education* yang ada di dua sekolah swasta di Yogyakarta. *Kedua*, di antara praktik-praktik itu ada yang berkaitan dengan ekstrakurikuler (ekskul). Contoh praktik seperti itu adalah ekskul rebana yang diikuti siswa lintas agama di salah satu SMK Katolik di Semarang atau fasilitasi kegiatan rohani bagi setiap ekskul keagamaan. *Ketiga*, di antara praktik-praktik itu ada yang berkaitan dengan program kokurikuler. Contoh dari hal itu misalnya program *homestay* dan kunjungan ke museum, seperti yang dilakukan oleh sekolah Islam di Depok dan Purwakarta. *Keempat*, di antara praktik-praktik itu ada yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Kasus praktik seperti itu misalnya penyediaan musala di beberapa sekolah Katolik dan Kristen, penyediaan ruang belajar pendidikan

agama non-PAI, dan pembuatan taman sebagai ruang simbol keragaman. *Kelima*, di antara praktik-praktik itu ada yang berkaitan dengan pengelolaan kelas; misalnya pembuatan kontrak siswa dan pembauran komposisi siswa di kelas, yang ada di salah satu sekolah negeri di Purwakarta. *Keenam*, di antara praktik-praktik itu ada yang terkait dengan rekrutmen guru dan tenaga kependidikan (GTK); yaitu bahwa sekolah-sekolah swasta dengan basis agama tertentu merekrut GTK yang agamanya berbeda-beda dengan afiliasi agama yayasanannya, contohnya yaitu sekolah berbasis yayasan non-Islam di Purwakarta dan Yogyakarta yang merekrut GTK beragama Islam. *Ketujuh*, di antara praktik-praktik itu ada yang terkait dengan penyelenggaraan selebrasi keragaman; misalnya yaitu festival seni-budaya di sekolah-sekolah Yayasan Iskandar Muda di Medan. *Kedelapan*, di antara praktik-praktik itu, ada pula yang terkait dengan aksi sosial. Contoh kasusnya yaitu donasi lintas agama dan subsidi silang antar siswa yang berbeda agama yang ada di beberapa sekolah yang diceritakan di atas.

BAB IV

PROSES KELAHIRAN PRAKTIK PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI SEKOLAH

Bagian ini memaparkan tentang proses kelahiran atau kemunculan ragam praktik pengelolaan keragaman agama yang ada di sekolah-sekolah di masing-masing lokasi penelitian.

A. PROSES KELAHIRAN PRAKTIK PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI SEKOLAH DI PURWAKARTA

Berbagai praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah negeri di Kabupaten Purwakarta pada dasarnya merupakan implementasi pendidikan karakter, khususnya karakter religius dan nasionalis, serta implementasi Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter (Perbup No. 69/2015). Perbup tersebut sebetulnya menasar pendidikan karakter, tetapi dalam implementasinya ada penjaminan terhadap fasilitasi peningkatan iman dan takwa setiap siswa sesuai dengan agama mereka masing-masing. Perwujudannya kemudian yaitu penyediaan guru-guru AKPK dan ruangan ibadah atau ruang pembelajaran agama. Ada dua hal yang dapat dipetik dari implementasi Perbup itu. *Pertama*, ada harapan bahwa setiap siswa memahami ajaran agamanya masing-masing melalui bimbingan guru-guru yang jelas kualifikasinya; sehingga tidak mudah terpengaruh ajaran agama yang bertentangan dengan Pancasila.

Kedua, penjaminan fasilitasi peningkatan iman dan takwa bagi setiap siswa dari setiap agama menunjukkan, sekaligus mengajarkan, penghormatan terhadap keragaman. Adapun praktik pengelolaan keragaman di sekolah swasta biasanya terkait dengan kebijakan yayasan pendidikan yang menaungi mereka; di samping, dalam kadar tertentu, juga dipengaruhi oleh Perbup No. 69/2015. Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa proses kemunculan berbagai praktik pengelolaan keragaman di atas dapat dikaitkan dengan kemunculan Perbup No. 69/2015, untuk sekolah-sekolah negeri, dan dengan visi-misi yayasan pendidikan terkait, untuk sekolah-sekolah swasta.

Khusus untuk SMP Plus Al-Muhajirin, visi tentang toleransi jelas bersumber dari gagasan dan teladan pendiri Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Secara tegas, perwakilan Yayasan Al-Muhajirin mengungkapkan bahwa pendiri yayasan merupakan sosok yang terbuka dan terbiasa bergaul serta bekerja sama dengan orang dengan latar belakang yang beragam. Siswa dan warga sekolah yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Al-Muhajirin diajarkan bahwa interaksi dan kerja sama dengan non-Muslim tidak akan membuat keimanan dan ke-Islam-an mereka luntur. Keterbukaan dan nilai toleransi itulah yang ingin dilestarikan di satuan pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Al-Muhajirin.

B. PROSES KELAHIRAN PRAKTIK PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI SEKOLAH DI DEPOK

Berbagai praktik pengelolaan keragaman agama yang ada di sekolah di Depok, sebagaimana telah diceritakan di atas, pada dasarnya merupakan bagian dari hal lain yang tidak secara khusus ditujukan untuk pengelolaan keragaman; misalnya penumbuhan jiwa mandiri. Namun, praktik-praktik tersebut, khususnya di sekolah-sekolah swasta Islam, diyakini dapat membekali siswa untuk berhadapan dengan keragaman atau mengenalkan siswa dengan keragaman. Sehubungan dengan itu, kemunculan praktik-praktik tersebut dapat dikaitkan dengan kelahiran berbagai program yang

ada di sekolah-sekolah dimaksud. Sebagai contoh, kegiatan *homestay* muncul karena ada gagasan untuk mendidik anak-anak agar bisa hidup mandiri. Dengan demikian, pihak yang berperan dalam kelahiran praktik-praktik tersebut yaitu yayasan pendidikan tempat sekolah yang bersangkutan bernaung.

C. PROSES KELAHIRAN PRAKTIK PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI SEKOLAH DI YOGYAKARTA

Berbagai praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah-sekolah di Yogyakarta pada dasarnya tidak dapat ditelusuri proses kemunculannya secara jelas, tetapi sebagian masih bisa dilacak. Beberapa praktik di SMAN 1 Yogyakarta telah berlangsung sekian lama, sehingga guru-guru yang ada sekarang hanya meneruskannya begitu saja. Namun, beberapa praktik dapat dikaitkan dengan kehadiran salah satu guru Pendidikan Agama Islam. Pada awalnya, guru tersebut menemukan ada beberapa siswa yang cara pandang ke-Islam-annya cenderung ekstrem dan bahkan menolak Pancasila. Maka guru tersebut melakukan upaya-upaya atas inisiatif dirinya sendiri untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap keragaman. Guru itu melihat bahwa cara pandang beragama yang ekstrem itu salah, tidak sesuai yang ia pahami selama dia belajar Islam di pesantren dan kuliah di perguruan tinggi Islam yang mengajarkan moderasi beragama.

Praktik-praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah-sekolah swasta di Yogyakarta secara umum terkait dengan pandangan yayasan tempat mereka bernaung, yang memang menekankan inklusivitas dan multikulturalisme. Namun, dapat pula dilihat adanya peran organisasi nonpemerintah dalam penyebaran gagasan-gagasan yang mendukung pandangan itu. Berdasarkan keterangan dari salah seorang guru Pendidikan Agama Islam dari SMA PIRI 1, salah satu pihak yang berperan dalam menyadarkan para guru agama di Yogyakarta tentang peran penting mereka dalam menanamkan nilai-nilai toleransi yaitu Yayasan Interfidei, singkatan dari *Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia*. Organisasi tersebut memang

memiliki visi tentang keragaman dan secara aktif mempromosikan keragaman dan kerja sama antaragama dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Interfidei telah memberikan pelatihan dan pembimbingan kepada sejumlah guru agama terkait dengan pemahaman tentang keragaman.

D. PROSES KELAHIRAN PRAKTIK PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI SEKOLAH DI SEMARANG

Berbagai praktik pengelolaan keragaman agama yang ada di sekolah-sekolah negeri di Semarang pada dasarnya merupakan pemenuhan kebutuhan setiap siswa sesuai agamanya masing-masing. Sehubungan dengan itu, proses kelahirannya tidak dapat ditelusuri dengan pasti. Pengecualian yaitu untuk praktik di SDN Pendrikan Kidul dan SDN Tandang 1. Di kedua sekolah tersebut, terlihat peran kepala sekolah dalam menginisiasi berbagai praktik yang berkaitan dengan keragaman. Lain halnya dengan sekolah-sekolah yang menjadi dampingan program Sekolah Damai, yaitu SMAN 7, SMAN 10, dan SMAN 11 Semarang. Berbagai praktik di sekolah-sekolah itu tentu saja terkait erat dengan program Sekolah Damai,⁴ dan secara tidak langsung dengan inisiatif organisasi Wahid Foundation. Jadi, berbicara proses kemunculan praktik pengelolaan keragaman di ketiga sekolah itu, dapat dilihat bahwa hal tersebut bermula dari implementasi program Sekolah Damai yang digagas oleh Wahid Foundation.

Sementara itu, berbagai praktik pengelolaan keragaman agama yang ada di sekolah-sekolah di Semarang, dalam hal ini yaitu di SMK Kanisius Ungaran, dapat ditelusuri proses kelahirannya dengan melihat keterlibatan

4 Sekolah Damai merupakan salah satu program yang digagas dan diimplementasikan oleh Wahid Foundation. Orientasi program tersebut yaitu menghadirkan budaya sekolah yang damai dan toleran melalui berbagai gerakan yang terencana, terukur dan memiliki tujuan jangka panjang. Aspek-aspek yang disasar oleh program itu adalah kebijakan sekolah, praktik toleransi dan perdamaian di sekolah, dan pengelolaan organisasi kesiswaan (Wahid Foundation, 2019).

seorang tokoh agama Katolik Semarang. Kegiatan ekstrakurikuler rebana di sekolah tersebut lahir atas masukan dari seorang pemuka agama Katolik yang bernama Romo Aloysius Budi Purnomo, yang biasa disebut Romo Budi, dengan alasan memfasilitasi ekspresi keagamaan siswa beragama Islam. Gagasan itu muncul setelah Romo Budi, dalam suatu kesempatan kunjungan ke sekolah itu, melihat adanya beberapa siswi SMK Kanisius Ungaran yang mengenakan jilbab.

E. PROSES KELAHIRAN PRAKTIK PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI SEKOLAH DI MEDAN

Berbagai praktik pengelolaan keragaman agama yang ada di sekolah-sekolah di Medan ada yang dapat ditelusuri proses kelahirannya, ada pula yang tidak. Praktik-praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah negeri termasuk yang tidak dapat diungkap proses kelahirannya karena pada dasarnya yang mereka lakukan hanya menjalankan apa yang menjadi tugas mereka; dan biasanya ada kecenderungan tradisi-tradisi yang ada di sekolah diteruskan begitu saja oleh para kepala sekolah dan guru yang datang silih berganti.

Sementara itu, praktik-praktik yang ada di sekolah-sekolah swasta, khususnya sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, dapat ditelusuri proses kelahirannya sesuai dengan kelahiran yayasan pendidikan yang menaungi mereka. YPSIM mulai didirikan pada tahun 1987 oleh seorang bernama Sofyan Tan, seorang dokter yang pada waktu itu bekerja sebagai guru dan dosen. Visi pendirian YPSIM memang lembaga pendidikan yang multikultur; bukan hanya dalam aspek agama, tetapi juga dalam hal etnis dan sosial-ekonomi.

F. FAKTOR-FAKTOR PENDORONG LAHIRNYA PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI SEKOLAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa proses kelahiran praktik-praktik pengelolaan keragaman agama dapat dikaitkan dengan

lima faktor pendorong. Kelima faktor pendorong tersebut yaitu intervensi dari kepala daerah, intervensi dari organisasi nonpemerintah, intervensi tokoh agama, visi lembaga, dan inisiatif guru. Tabel 3 menguraikan kelima faktor di atas.

Tabel 3. Faktor-faktor Pendorong Lahirnya Pengelolaan Keragaman Agama di Sekolah

Faktor	Keterangan	Contoh Kasus
Intervensi kepala daerah	Dedi Mulyadi selaku Bupati Purwakarta pada waktu itu	Sekolah-sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Purwakarta
Intervensi organisasi nonpemerintah	Interfidei di Yogyakarta, Wahid Foundation di Semarang	Sekolah-sekolah negeri dan swasta di Yogyakarta, sekolah-sekolah dampingan Wahid Foundation di Semarang
Intervensi tokoh agama	Romo Aloysius Budi Purnomo	SMK Kanisius Ungaran, Kabupaten Semarang
Visi lembaga	YPSIM, Yayasan Al-Muhajirin, Yayasan PIRI, Sekolah Olifant, SMA Tumbuh, SMA BOPKRI 1	Sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan lembaga-lembaga tersebut
Inisiatif guru	Guru PAI di SMAN 1 Yogyakarta	SMAN 1 Yogyakarta

Sumber: Hasil olah data.

BAB V

DAYA TAHAN DAN PELEMBAGAAN PRAKTIK PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI SEKOLAH

Bagian ini menguraikan aspek daya tahan dan upaya pelebagaan berbagai praktik pengelolaan keragaman agama yang telah dipaparkan di Bab 3.

A. DAYA TAHAN DAN PELEMBAGAAN PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI PURWAKARTA

Pada dasarnya, berbagai praktik pengelolaan keragaman agama yang ada di sekolah-sekolah di Purwakarta belum teramati daya tahannya. Hal tersebut terkait dengan adanya pandangan bahwa “semuanya baik-baik saja” dan tidak ada masalah yang terkait dengan keragaman; sehingga pihak-pihak terkait luput dalam mengamati apakah berbagai praktik pengelolaan dan pengenalan keragaman yang mereka lakukan berdampak terhadap siswa dan warga sekolah secara umum dalam menghadapi isu-isu terkait SARA atau pengaruh ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pengecualiannya yaitu untuk SMP Plus Al-Muhajirin. Pihak yayasan bisa mengklaim bahwa para siswa dan santrinya tidak mudah terpengaruh isu SARA yang mengarah kepada kekerasan, salah satu contohnya yaitu ketika terjadi peristiwa perusakan patung-patung di Purwakarta,⁵ mereka tidak

5 Peristiwa perusakan patung-patung di Purwakarta terjadi pada tahun 2011 dan 2016. Patung-

terprovokasi dan ikut arahan dari pimpinan pesantren.

Terkait dengan upaya pelebagaan, sekolah-sekolah di Kabupaten Purwakarta secara umum tidak memiliki strategi khusus dalam rangka pelebagaan praktik-praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah mereka. Upaya yang telah mereka lakukan hanya penyebarluasan gagasan melalui publisitas. Hal yang telah mereka tempuh di antaranya yaitu publikasi melalui situs jejaring sekolah dan kanal *Youtube*, serta diseminasi melalui forum studi banding.

B. DAYA TAHAN DAN PELEMBAGAAN PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI DEPOK

Daya tahan praktik-praktik pengelolaan keragaman agama yang ada di sekolah-sekolah di Depok sangat sulit untuk diukur atau dipahami. Di samping itu, sepertinya sekolah-sekolah juga tidak begitu menaruh perhatian terhadap daya tahan para siswa dan warganya karena adanya anggapan bahwa tidak ada masalah yang terkait dengan keragaman agama dan pengelolaannya. Hal yang terungkap yaitu keyakinan bahwa mereka telah terbiasa hidup berdampingan sejak dahulu dan tidak ada isu menonjol terkait dengan keragaman. Penyebarluasan gagasan dan pelebagaan dengan demikian juga tidak menjadi fokus. Upaya yang dilakukan di antaranya yaitu memuat berita tentang kegiatan yang dilakukan di situs jejaring sekolah.

C. DAYA TAHAN DAN PELEMBAGAAN PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI YOGYAKARTA

Hal-hal yang dilakukan dan dikembangkan oleh berbagai sekolah di

patung tersebut didirikan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta atas inisiatif Bupati Dedi Mulyadi. Tujuan pembuatan patung tersebut sebagai simbol penghargaan terhadap warisan budaya leluhur, khususnya budaya Sunda. Pihak yang melakukan perusakan terhadap patung itu mengatasnamakan umat Islam. Alasan mereka merusak patung-patung-patung tersebut yaitu bahwa patung-patung itu merupakan simbol-simbol agama Hindu dan dapat merusak akidah umat Islam. Pada insiden tahun 2011, patung Gatot Kaca, Semar, dan Bima dirobohkan; sementara pada tahun 2016, patung Arjuna Memanah dibakar.

Yogyakarta diyakini berdampak terhadap sikap siswa dan warga sekolah yang cenderung toleran, meskipun tanpa indikator atau tolok ukur yang jelas. Sebagai contoh, untuk tahun ajaran 2019/2020, SMAN 3 Yogyakarta memiliki ketua OSIS yang beragama Budha, yang merupakan minoritas di antara para siswa yang beragama Islam. Contoh lainnya yaitu keyakinan Kepala SMA BOPKRI 1 bahwa para siswa dan warga sekolahnya, termasuk dirinya, biasa berbaur dalam kegiatan keagamaan yang berbeda-beda tanpa merasa takut kehilangan atau mengalami pengurangan iman terhadap agama sendiri. Selain itu, siswa dan warga sekolah SMA Tumbuh dan Sekolah Olifant yang terbiasa berdiskusi tentang agama yang berbeda-beda tanpa ada perdebatan yang berakar dari perasaan paling benar.

Belum ada upaya penyebarluasan yang masif untuk berbagai praktik tersebut. Beberapa sekolah mengandalkan publikasi buku, misalnya SMA Tumbuh dan SMA PIRI 1. Selebihnya hanya upaya seadanya dengan mengandalkan situs jejaring sekolah dan diseminasi dalam forum studi banding. Selain itu, pelebagaan juga masih belum menjadi perhatian sekolah-sekolah itu, karena mereka bahkan masih harus bergelut dengan internalnya sendiri.

D. DAYA TAHAN DAN PELEMBAGAAN PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI SEMARANG

Berbagai praktik pengelolaan keragaman agama yang ada di sekolah-sekolah di Semarang sebagian besar tidak teramati daya tahannya. Namun, ada juga yang telah secara meyakinkan menunjukkan daya tahan. Sebagai contoh yaitu SMAN 7 Semarang. Daya tahan sekolah tersebut terhadap isu yang berkaitan dengan keragaman terbukti dengan adanya ketua kelas yang beragama non-Islam, yang merupakan minoritas, dan dapat diterima oleh warga sekolah dengan baik.

Belum ada upaya yang sistematis untuk menyebarluaskan dan melembagakan berbagai praktik pengelolaan keragaman agama yang dikemukakan di atas. Sekolah-sekolah di atas pada dasarnya masih

berorientasi pada internal lembaganya sendiri. Publisitas yang mereka andalkan hanya ketika ada acara-acara atau perayaan hari besar tertentu, baik internal maupun eksternal. Bahkan, sekolah-sekolah yang menjadi dampingan program Sekolah Damai pun masih dalam proses memikirkan strategi penularan praktik mereka ke sekolah-sekolah lain.

E. DAYA TAHAN DAN PELEMBAGAAN PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI MEDAN

Sekolah-sekolah di Medan yang disinggung dalam uraian di Bab 2 secara umum masih belum terpikir untuk mengamati dampak dari praktik-praktik pengelolaan keragaman agama yang mereka miliki terhadap daya tahan warga sekolahnya; selain bahwa hal tersebut juga memang sulit untuk dilakukan. Namun, terungkap satu fakta yang dapat dianggap sebagai daya tahan dimaksud. Kasusnya ada di SMAN 1 Medan. Guru Pendidikan Agama Islam sekolah tersebut menuturkan bahwa sekolahnya pernah beberapa didatangi oleh aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berdakwah mengenai pendirian khilafah.⁶ Aktivis tersebut datang berkali-kali bahkan hingga masuk ke ruang guru untuk mengajak para guru berbincang tentang khilafah. Sang guru agama menyatakan bahwa para siswa dan guru SMAN 1 Medan tidak terpengaruh paham yang dibawa oleh aktivis HTI tersebut, meskipun sang aktivis cukup gigih dalam mempengaruhi warga sekolah itu.

Perihal penyebaran dan pelebagaan, pada dasarnya sekolah-sekolah yang diceritakan di atas belum memiliki strategi. Bahkan, YPSIM mengaku bahwa mereka masih lebih banyak berorientasi ke dalam. Mereka

6 HTI merupakan sebuah organisasi yang mengusung penegakan khilafah Islam atau negara Islam. Organisasi tersebut dibubarkan pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Pembubaran didasarkan pada argumen bahwa HTI termasuk organisasi masyarakat yang "menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila" (BBC News Indonesia, 2017)

menganggap bahwa masih banyak hal yang harus mereka lakukan untuk mewujudkan visi mereka tentang toleransi dan keragaman di sekolah-sekolah yang mereka kelola. Sehubungan dengan itu, mereka belum terpikir untuk mengangkat konsep mereka dalam lingkup yang lebih luas. Hal yang telah mereka upayakan yaitu penerbitan buku-buku, sebagai publikasi konsep mereka tentang sekolah yang multikultur.

F. DAYA TAHAN DAN PELEMBAGAAN PRAKTIK PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI SEKOLAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa daya tahan warga sekolah terhadap penetrasi paham dan tindakan yang anti keragaman agama belumlah teramati dengan baik. Artinya, belum ada keyakinan apakah berbagai praktik pengelolaan keragaman agama itu berdampak terhadap sikap warga sekolah dalam menghadapi isu-isu yang mengancam kerukunan beragama. Hal tersebut tampaknya terkait dengan adanya pemikiran bahwa tidak ada masalah terkait keragaman agama dan pengelolaannya; “semuanya baik-baik saja” karena para siswa sudah biasa hidup berdampingan, seperti diungkapkan oleh sebagian informan. Di samping itu, daya tahan itu juga sulit untuk diamati, dipahami, apalagi diukur.

Meskipun demikian, ada beberapa kasus yang dapat dikategorikan sebagai daya tahan yang dimaksud dalam buku ini. *Pertama*, adanya ketua OSIS dan ketua kelas yang berlatar belakang agama minoritas; seperti dalam kasus SMAN 3 Yogyakarta dan SMAN 7 Semarang. *Kedua*, tertolaknya dakwah aktivis organisasi yang mengusung khilafah; yang terjadi di SMAN 1 Medan. *Ketiga*, adanya kebiasaan dialog antaragama tanpa adanya kecenderungan untuk mendiskreditkan agama tertentu; seperti yang terjadi di Sekolah Olifant. *Keempat*, tidak terpengaruhnya siswa oleh isu SARA yang menjurus kepada kekerasan; yang dicontohkan oleh SMP Plus Al-Muhajirin yang tidak terlibat dalam insiden perobohan patung-patung di Purwakarta.

Uraian-uraian di atas juga telah menunjukkan bahwa pelebagaan berbagai praktik pengelolaan keragaman agama itu masih belum menjadi isu bagi sekolah-sekolah yang diceritakan di atas. Hal tersebut seperti halnya terkait dengan fokus perhatian mereka yang masih berorientasi internal, khususnya terkait aspek akademik. Namun, beberapa dari sekolah-sekolah tersebut telah berupaya untuk menyebarluaskan gagasan dan praktik mereka. Publikasi yang mereka lakukan biasanya melalui situs jejaring (*website*) sekolah atau yayasan, media sosial seperti Youtube dan Facebook, dan penerbitan buku. Di samping itu, beberapa sekolah juga menjalin kerja sama untuk saling berbagi dan mendukung dalam mengusung gagasan tentang penghormatan terhadap keragaman.

Aspek daya tahan yang teramati dan upaya pelebagaan yang telah diuraikan di atas secara ringkas disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Daya Tahan dan Pelebagaan Praktik Pengelolaan Keragaman

Lokasi	Sekolah	Daya Tahan	Pelebagaan
Purwakarta	SMP Plus Al-Muhajirin	Tidak terprovokasi oleh isu SARA yang menjurus kepada kekerasan	-
Depok	Semua	Tidak teramati	-
Yogyakarta	SMAN 3	Ketua OSIS tahun ajaran 2019/2020 beragama Budha, tetapi tidak ada penolakan	-
	Sekolah Olifant	Biasa diskusi antaragama tanpa ada konflik	-
Semarang	SMAN 7	Ada salah satu ketua kelas beragama non-Islam, tetapi tidak ada penolakan	-
Medan	SMAN 1	Tidak terpengaruh dakwah tentang khilafah	-

Sumber: Hasil olah data.

BAB VI

MODEL PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI SEKOLAH

Berbagai uraian di atas telah mengungkapkan praktik-praktik pengelolaan keragaman agama yang ada di sekolah-sekolah di lima daerah yang menjadi lokasi penelitian; beserta proses kelahiran, daya tahan, dan upaya-upaya terkait pelebagaannya. Jika ditelaah, spektrum praktik-praktik itu cukup luas, dari yang sifatnya mendasar dengan mengandalkan mata pelajaran PPKn dan program pendidikan karakter, hingga yang inovatif seperti modifikasi mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan antar agama (*interreligious education*). Jika dikategorikan berdasarkan aspek-aspek yang muncul, maka tampak bahwa ragam praktik itu berkisar dalam aspek kurikulum, ekstrakurikuler, kokurikuler, sarana dan prasarana, pengelolaan kelas, rekrutmen GTK, acara selebrasi, dan sksi sosial. Sementara itu, dengan memperhatikan proses kelahiran ragam praktik yang ada, dapat dilihat bahwa pengelolaan keragaman agama di sekolah terkait dengan keberadaan intervensi kepala daerah, intervensi organisasi nonpemerintah, intervensi tokoh agama, visi lembaga, dan inisiatif guru. Adapun perihal daya tahan dan pelebagaan, tampaknya belum ada sekolah yang mengamati serta mengupayakannya dengan baik.

Dengan melihat ragam dan proses kelahirannya, variasi praktik-praktik

tersebut dapat dikategorikan lebih lanjut berdasarkan keberadaan visi lembaga terkait keragaman, intervensi dari eksternal, dan inisiatif internal. Visi lembaga, yayasan pendidikan atau sekolah, yang berkaitan dengan keragaman berperan penting dalam melahirkan praktik-praktik pengelolaan keragaman. Sekolah-sekolah yang diceritakan di atas, ada yang memiliki visi, baik eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan toleransi dan pengelolaan keragaman; ada pula yang tidak. Peran visi tentang keragaman ini lebih banyak berlaku untuk sekolah-sekolah swasta; karena untuk sekolah-sekolah negeri, visi yang dimiliki tidak berpengaruh langsung terhadap kebijakan dan kebiasaan yang ada di sekolah-sekolah yang bersangkutan. Adapun intervensi dari eksternal atau pihak luar maksudnya yaitu keberadaan peran pihak luar sekolah dalam menginisiasi berbagai praktik pengelolaan keragaman di suatu sekolah. Uraian di atas telah menunjukkan bahwa ada beberapa pihak yang berperan dalam kehadiran praktik-praktik pengelolaan keragaman di sekolah. Pihak-pihak tersebut yaitu: kepala daerah, organisasi nonpemerintah, tokoh agama, dan guru. Hal tersebut berlaku baik di sekolah-sekolah negeri maupun sekolah-sekolah swasta. Tabel 5 menunjukkan pemetaan dan labelisasi praktik-praktik pengelolaan keragaman yang ditemukan dalam penelitian ini.

Tabel 5. Model Praktik Pengelolaan Keragaman di Sekolah

Kategori	Visi	Intervensi Eksternal	Inisiatif Internal	Karakteristik
Normatif	-	-	-	Mengandalkan PPKn dan pendidikan karakter; “eksternalitas” program yang sudah ada.
Mandiri	-	-	Ya	Penekanan pada peran individu tertentu, misalnya guru, tanpa adanya dukungan langsung dari pihak manapun.
Maju	-	Ya	-	Adanya peran pihak luar.
Inovatif	Ya	Ya/Tidak	-	Inovasi dalam kurikulum.

Sumber: Hasil olah data.

Tabel 5 memaparkan pemetaan dan labelisasi ragam praktik pengelolaan keragaman yang telah diuraikan dalam bagian terdahulu. Tampak bahwa sekolah-sekolah yang diteliti ada yang memiliki visi yang terkait dengan keragaman, ada yang tidak. Sekolah-sekolah dimaksud juga ada yang mendapatkan intervensi dari pihak luar, ada yang tidak. Praktik-praktik di sekolah-sekolah yang bervisi keragaman, baik itu yang mendapatkan intervensi dari pihak luar ataupun tidak, dikategorikan sebagai “Praktik Inovatif”. Sekolah-sekolah dengan kategori ini sudah berani berinovasi dalam kurikulum, misalnya dengan menghadirkan pendidikan antaragama atau memodifikasi mata pelajaran tertentu dalam rangka mendukung pengelolaan keragaman. Hal tersebut biasanya ada di sekolah-sekolah swasta. Adapun praktik-praktik di sekolah-sekolah yang tidak bervisi keragaman tetapi mendapatkan intervensi dari pihak luar dikategorikan sebagai “Praktik Maju”. Sekolah-sekolah dengan kategori ini bisa “berinovasi” hanya setelah mendapatkan *treatment* tertentu dari pihak luar, misalnya pemerintah daerah atau tokoh tertentu. Ini biasa terjadi pada sekolah negeri dan sekolah swasta yang tidak memiliki visi terkait keragaman. Sementara itu, praktik-praktik di sekolah-sekolah yang tidak bervisi keragaman serta tidak mendapatkan intervensi dari pihak luar dikategorikan sebagai “Praktik Normatif”. Biasanya, sekolah-sekolah dengan kategori ini hanya mengandalkan kurikulum yang ada dalam mengelola keragaman, misalnya materi-materi dalam mata pelajaran PPKn dan program PPK. Hal tersebut bisa terjadi di baik di sekolah swasta maupun di sekolah negeri.

Terlepas dari ada atau tidaknya intervensi dan visi, dalam kasus salah satu sekolah negeri di Yogyakarta, ada peran seorang guru agama dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Sang guru agama atas inisiatif pribadi melakukan berbagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap keragaman di sekolah tempat ia mengajar. Hal itu dilandasi pemahamannya tentang agama, yang seharusnya moderat dan menghargai perbedaan. Dalam hal

ini, dengan merujuk Tabel 5, praktik demikian itu dikategorikan sebagai “Praktik Mandiri”.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa pihak yang berkontribusi terhadap lahirnya praktik-praktik pengelolaan keragaman di sekolah-sekolah yang diteliti. Pihak-pihak tersebut yaitu kepala daerah, organisasi nonpemerintah, tokoh agama, yayasan pendidikan, dan peran guru pendidikan agama (Islam).

Untuk kasus sekolah-sekolah di Purwakarta, terutama untuk sekolah-sekolah negeri, peran kepala daerah, yang waktu itu adalah Bupati Dedi Mulyadi, sangat vital dalam menggagas dan mengimplementasikan pendidikan karakter yang mengarah pada toleransi dan penghormatan terhadap keragaman. Dedi Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode, yaitu periode 2008-2013 dan 2013-2018. Ia memang dikenal sebagai pribadi yang pandangan agamanya moderat, mengusung toleransi dan penghormatan terhadap keragaman. Sehubungan dengan itu, ia biasa dikaitkan dengan kegiatan yang mempromosikan toleransi (Kompas.com, 2017; Rahayu, 2017; Salam, 2018). Dalam masa pemerintahannya, Dedi Mulyadi mengeluarkan Perbup No. 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter; yang kemudian berkontribusi terhadap pengelolaan keragaman di sekolah-sekolah yang ada di Purwakarta.

Dalam kasus Yogyakarta dan Semarang, ditemukan bahwa ada peran organisasi nonpemerintah dalam menginisiasi dan menanamkan gagasan tentang keragaman di antara para guru agama. Organisasi tersebut yaitu Wahid Foundation, melalui program “Sekolah Damai”. Wahid Foundation merupakan sebuah organisasi yang ditujukan untuk mewujudkan visi KH Abdurrahman Wahid, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus mantan Presiden Republik Indonesia, yang berkaitan dengan toleransi dan pengelolaan keragaman. Orientasinya tidak hanya terkait dengan ke-Islaman atau keagamaan, tetapi juga meliputi demokrasi, kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian (Wahid Foundation, 2015).

Sementara itu, di sekolah-sekolah di Yogyakarta, dapat dilihat adanya

pengaruh dari organisasi Interfidei. Interfidei, singkatan dari Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia, merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh para tokoh yang peduli dengan kehidupan sosial dan keagamaan Indonesia. Tujuan organisasi tersebut yaitu mempromosikan pentingnya merawat dan menghidupkan keragaman serta kerja sama dalam mencari solusi untuk berbagai masalah sosial yang ada di Indonesia. Lembaga tersebut dikenal juga dengan nama Institut DIAN, singkatan dari Dialog Antariman di Indonesia (Interfidei, n.d.). Organisasi tersebutlah yang telah memberikan berbagai pelatihan kepada beberapa guru pendidikan agama mengenai pluralisme. Alumni-alumni pelatihan Interfidei kemudian menerapkan ilmunya di sekolah masing-masing sehingga lahirlah praktik-praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah yang bersangkutan.

Sementara itu, dalam kasus SMK Kanisius Ungaran, ada peran tokoh agama—yaitu Romo Budi—dalam menginisiasi hadirnya praktik-praktik pengelolaan keragaman di sekolah tersebut. Romo Budi memiliki nama lengkap Romo Aloysius Budi Purnomo, yaitu seorang pastor yang menjabat sebagai Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Kesukupan Agung Semarang (Sugiyanto, 2019) dan Romo Kepala Riksa Pastoral Kampus Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang (Nurdin, 2017). Romo Budi dikenal sebagai tokoh agama Katolik yang dekat dengan tokoh-tokoh agama Islam dan giat mempromosikan dialog antaragama dalam kerangka menjaga persatuan bangsa (Sugiyanto, 2019). Oleh karena itu, ia dikenal sebagai tokoh agama yang memiliki visi tentang toleransi dan penghormatan terhadap keragaman.

Adapun dalam kasus sekolah swasta secara umum, yang menjadi determinan dari adanya praktik pengelolaan keragaman agama adalah visi yayasan yang menaunginya. Sekolah-sekolah seperti SMA Tumbuh, SMA Budi Mulia Dua, Sekolah Olifant di Yogyakarta merupakan contoh sekolah-sekolah yang bervisi keragaman. Selain itu, ada juga sekolah-sekolah Sultan Iskandar Muda di Medan.

Visi SMA Tumbuh yaitu “anak tumbuh dan berkembang sebagai

pembelajar yang berkarakter, menghargai keberagaman dan kearifan lokal, mencintai tanah air dan menunjukkan kesadaran sebagai warga dunia.” Sementara misinya yaitu: menyelenggarakan pendidikan inklusif yang mengembangkan anak sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing; memberikan pembelajaran yang mendorong anak menghargai keragaman agama, ekonomi, sosial, budaya, dan kebutuhan khusus; memberikan pembelajaran yang mendorong anak menghargai kekayaan bangsa dan potensi lokal, cinta tanah air dan kearifan lokal; dan memberikan pembelajaran yang menyiapkan anak sebagai warga dunia, berpikiran terbuka dan aktif berkontribusi secara positif (Sekolah Tumbuh, 2018).

Sementara itu, visi SMA Budi Mulia Dua yaitu “mewujudkan civitas sekolah yang berlogika kritis, berintelegensia sosial, memiliki nilai-nilai universal Islam dan berkesadaran sebagai warga dunia.” Misi sekolah tersebut yaitu: mengembangkan proses pembelajaran yang menyeimbangkan kemampuan logika dan intelegensia sosial serta menanamkan nilai-nilai universal Islam sebagai bagian untuk membentuk civitas sekolah yang berkesadaran sebagai warga dunia (SMA Budi Mulia Dua, 2017).

Adapun visi Sekolah Olifant yaitu “menjadi pelopor, dan penyedia pendidikan Indonesia modern untuk para pelajar muda, dan untuk membantu mempersiapkan mereka dalam rangka mencapai tujuan dalam komunitas yang semakin mengglobal dan internasional.” Sementara misinya yaitu: untuk mengasuh anak-anak secara holistik, baik di tingkat global maupun lokal, dengan tujuan membesarkan generasi yang kompeten, percaya diri, toleran, tegas, kreatif, komunikatif, menghargai orang lain, dan memiliki perspektif dunia yang terbuka dan jelas; serta untuk memelihara karakter individu anak-anak dengan memberikan pengetahuan terkini dan komprehensif (Olifant School, n.d.).

Visi tentang yang bernuansa keragaman juga tampak dalam visi Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda; yang berbunyi “mendidik generasi muda Indonesia menjadi manusia yang cerdas, religius, humanis dalam bingkai kesetaraan dan keberagaman.” Adapun misinya yaitu:

menyelenggarakan pendidikan mulai dari tingkat *play group*, TK, SD, SMP, SMA/SMK berdasarkan kurikulum nasional yang berlaku dengan muatan khusus berbasis budaya, karakter, dan kewirausahaan; menyelenggarakan program anak asuh silang dan berantai, untuk memberdayakan generasi muda dari beragam suku yang secara ekonomi berkekurangan agar bisa melakukan mobilitas sosial; menyelenggarakan pendidikan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk mempererat kerjasama, membangun kebersamaan, serta mengikis cara berpikir yang penuh muatan prasangka kesukuan dan kebencian rasial; serta menumbuhkan sikap saling menghormati dan menjaga toleransi antar umat beragama sesuai kepercayaan yang dianutnya (Saliman, Wulandari, & Mukminan, 2013).

Lain halnya dengan cerita SMAN 1 Yogyakarta, di mana salah seorang gurunya berinisiatif untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan yang moderat di kalangan siswanya. Sang guru merupakan seorang lulusan jurusan Pendidikan Agama Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Semasa menempuh pendidikan di UIN itu, ia juga memperdalam ilmu agamanya di pesantren Krapyak, Yogyakarta. Di samping melakukan pendekatan personal terhadap para siswa, ia juga berusaha untuk membangun kesepahaman dengan guru-guru lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan pemahaman keagamaan sang guru, yang menjadi dasar baginya untuk melakukan penilaian bahwa beberapa siswanya terindikasi memiliki pemahaman keagamaan yang radikal dan intoleran.

BAB VI PENUTUP

Paragraf-paragraf terdahulu telah memaparkan tentang berbagai praktik pengelolaan keragaman agama yang ada di sekolah-sekolah di lima lokasi penelitian. Ragam praktik itu membentang dari yang bersifat normatif hingga yang inovatif. Dengan melihat proses kelahirannya, dapat dilihat bahwa ada beberapa pihak yang berperan dalam kehadiran praktik-praktik tersebut. Pihak-pihak tersebut yaitu: kepala daerah, organisasi nonpemerintah, yayasan pendidikan, tokoh agama, dan guru pendidikan agama.

Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik-praktik pengelolaan keragaman agama memang sebetulnya sudah ada di sekolah-sekolah. Lebih jauh lagi, inisiatif-inisiatif yang terkait dengan pengelolaan keragaman agama juga telah banyak dilakukan, baik oleh individu maupun lembaga. Namun, berbagai praktik dan inisiatif itu berserak sedemikian rupa sehingga tidak dirasakan pengaruhnya dalam konteks yang lebih luas. Karena bergerak sendiri-sendiri, inisiatif-inisiatif itu harus menghadapi berbagai permasalahan masing-masing, tanpa adanya kerja sama. Padahal, tujuan dan tantangan yang mereka hadapi tidak jauh berbeda.

Beberapa sekolah memang tidak memiliki praktik pengelolaan keragaman yang sistematis dan terorganisasi dengan baik. Hal tersebut

diduga terkait dengan kedudukan isu pengelolaan keragaman agama dalam dunia pendidikan di Indonesia secara umum. Isu pengelolaan keragaman agama sepertinya masih tertutupi agenda-agenda lain yang dianggap lebih mendesak, terutama pencapaian akademik. Di samping itu, dalam benak pihak sekolah dan dinas pendidikan pada umumnya tertanam pandangan bahwa para siswa sudah terbiasa hidup berdampingan secara rukun sehingga tidak ada masalah yang terkait dengan keragaman agama.

Dengan memperhatikan adanya praktik pengelolaan keragaman agama yang normatif, mandiri, maju, dan inovatif—sesuai dengan temuan-temuan dan analisis penelitian yang telah dipaparkan di atas—buku ini merekomendasikan tiga hal; yang ditujukan kepada para pembuat kebijakan pendidikan, yaitu Kemdikbud dan dinas-dinas yang mengurus pendidikan di level provinsi dan kabupaten/kota. *Pertama*, pemetaan dan *scale up* inisiatif pengelolaan keragaman agama. Saat ini berbagai inisiatif untuk mengelola keragaman agama telah dilakukan oleh banyak pihak, baik perorangan maupun organisasi. Namun, inisiatif-inisiatif itu berserakan, tidak terintegrasi, dan menghadapi tantangan secara sendiri-sendiri. Berbagai inisiatif tersebut perlu untuk diidentifikasi, dipetakan, dan kemudian dilihat kemungkinannya untuk diadopsi serta diperbesar skalanya secara nasional, dengan tetap memperhatikan konteks kelokalan masing-masing daerah. Pemetaan dan *scale up* juga dapat ditujukan kepada sekolah-sekolah dengan kategori praktik pengelolaan keragaman agama yang maju dan inovatif, agar mereka dapat menularkan gagasan dan praktik yang mereka miliki. *Kedua*, pengarusutamaan (*mainstreaming*) isu keragaman agama dalam berbagai program dan kegiatan di sekolah. Banyak sekolah hanya mengandalkan PPKn dan pendidikan karakter dalam mengelola keragaman agama dan menanamkan nilai-nilai toleransi. Hal tersebut masih dalam tataran normatif. Lebih jauh lagi, efektivitas kedua hal tersebut dalam membentuk sikap siswa yang toleran dan menghargai keragaman juga masih menjadi pertanyaan. Dengan adanya pengarusutamaan isu keragaman, sekolah-sekolah tidak dibebani dengan hal baru, baik itu mata

pelajaran ataupun program baru. Hal yang harus mereka lakukan yaitu mengemas berbagai program dan kegiatan mereka dengan tema keragaman (agama). *Ketiga*, pemberian insentif bagi lembaga dan individu yang berperan, baik dalam hal inisiatif maupun praktik, dalam pengelolaan keragaman agama. Ada beberapa pihak, baik lembaga maupun individu, telah menunjukkan perannya dalam pengelolaan keragaman di sekolah. Dalam rangka memotivasi dan menjadikan mereka inspirasi, diperlukan pemberian insentif. Insentif tersebut bisa berupa material atau non-material. Insentif material di antaranya bisa berupa: penghargaan dan bantuan pemerintah. Sementara itu, insentif non-material di antara bisa berupa: pendampingan, pendidikan, atau pelatihan.

Ketiga hal yang tercakup dalam rekomendasi di atas dapat dituangkan dalam bentuk regulasi; yang dapat dikeluarkan oleh Kemdikbud—misalnya dalam bentuk peraturan menteri—maupun kepala daerah selaku atasan dari dinas-dinas yang mengampu urusan pendidikan—misalnya dalam bentuk pergub (peraturan gubernur), perbup (peraturan bupati), atau perwali (peraturan walikota). Keberadaan regulasi yang seperti itu penting untuk mengisi kekosongan dasar hukum yang khusus bagi pengelolaan keragaman agama, maupun keragaman secara umum. Dengan adanya regulasi yang khusus mengenai pengelolaan keragaman, sekolah-sekolah diharapkan menjadi lebih tanggap terhadap isu tersebut sehingga terdorong untuk mengembangkan pengelolaan keragaman agama sesuai dengan konteks mereka masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, I., & Ghazali, H. (2016). Toleransi remaja Islam kepada pemeluk agama yang berbeda: Studi ekstrakurikuler rohani Islam (Rohis) SMA di Bekasi, Jawa Barat. *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 1(1), 1–22. <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v1i1.32>
- BBC News Indonesia. (2017). Resmi dibubarkan, HTI pertimbangkan ajukan gugatan ke PTUN. Retrieved January 22, 2020, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40654463>
- Handayani, P. (2016). Kebijakan sekolah untuk mengantisipasi diskriminasi minoritas di SMA N 1 Muntilan. In Suhadi, L. K. Pary, F. M. Imamah, & M. Tahun (Eds.), *Mengelola keragaman di sekolah: Gagasan dan pengalaman guru* (pp. 99–108). Yogyakarta: CRCs (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Universitas Gadjah Mada. <https://doi.org/10.1177/0034523717745341>
- Interfidei. (n.d.). Interfidei. Retrieved January 22, 2020, from <https://www.interfidei.or.id/profil>
- Karolina, A. I., Sulistyarini, & Rustiyarso. (2019). Peran sekolah dalam membangun sikap toleransi beragama. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 8(3), 1–9.
- Kementerian Agama. (2019). *Moderasi beragama*. Jakarta: Kementerian Agama.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
- Kementerian Pendidikan Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.01.043>
- Kompas.com. (2017). Dedi Mulyadi: Toleran dan intoleran jangan dibawa ke ranah politik. Retrieved January 22, 2020, from <https://regional.kompas.com/read/2017/05/22/16523451/dedi.mulyadi.toleran.dan.intoleran.jangan.dibawa.ke.ranah.politik>
- Maarif Institute. (2018). *Menjaga benteng kebinekaan di sekolah (Studi kebijakan OSIS di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon)*. Jakarta: Maarif Institute.
- Nurdin, N. (2017). Cara unik Romo Budi saat pindah tempat pelayanan. Retrieved January 22, 2020, from <https://regional.kompas.com/read/2017/11/30/11145141/cara-unik-romo-budi-saat-pindah-tempat-pelayanan>
- Olifant School. (n.d.). Vision, Olifant School. Retrieved January 22, 2020, from <https://www.olifantschool.com/vision>
- PPIM UIN Jakarta. (2018). *Pelita yang meredup: Potret keberagaman guru Indonesia*. Jakarta.
- Rahayu, C. M. (2017). Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil bicara toleransi di kongres Komnas HAM. Retrieved January 22, 2020, from <https://news.detik.com/berita/d-3448924/dedi-mulyadi-dan-ridwan-kamil-bicara-toleransi-di-kongres-komnas-ham>
- Raihani. (2014). Creating a culture of religious tolerance in an Indonesian school. *South East Asia Research*, 22(4), 541–560. <https://doi.org/10.5367/sear.2014.0234>

- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republika. (2019). Ini desa terbaik dalam toleransi beragama di Karanganyar. Retrieved October 2, 2019, from <https://republika.co.id/berita/pxuwge368/nasional/daerah/19/09/14/pxtxrf3720000-ini-desa-terbaik-dalam-toleransi-beragama-di-karanganyar>
- Republika Online. (2019, December 16). Kemenag: Indeks kerukunan Indonesia kategori tinggi. Retrieved June 30, 2020, from <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/12/18/dunia-islam/islam-nusantara/19/12/16/q2l0fx428-kemenag-indeks-kerukunan-indonesia-kategori-tinggi>
- Salam, B. (2018). Dedi Mulyadi aplikasikan nilai toleransi hasil ajaran Gus Dur. Retrieved January 22, 2020, from <https://www.merdeka.com/politik/dedi-mulyadi-aplikasikan-nilai-toleransi-hasil-ajaran-gus-dur.html>
- Saliman, Wulandari, T., & Mukminan. (2013). *Laporan kemajuan penelitian unggulan perguruan tinggi “model pendidikan multikultural pada “sekolah pembauran” di Medan, Sumatera Utara*. Yogyakarta.
- Sekolah Tumbuh. (2018). About Sekolah Tumbuh. Retrieved January 22, 2020, from <https://sekolahtumbuh.sch.id/about-sekolah-tumbuh/>
- Setara Institute. (2018). *Press release Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2018*. Retrieved from <http://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-ikt-tahun-2018/>
- Sila, M. A. (2017). Kerukunan umat beragama di Indonesia: Mengelola keragaman dari dalam. In I. Ali-Fauzi, Z. A. Bagir, & I. Rafsadi (Eds.), *Kebebasan, toleransi dan terorisme: Riset dan kebijakan agama di Indonesia* (pp. 117–158). Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina.
- SMA Budi Mulia Dua. (2017). About SMA Internasional Budi Mulia Dua. Retrieved January 22, 2020, from <http://sma.budimuliadua.com/about-us/>

- Sugiyanto, A. E. (2019). Pastor Aloysius Budi Purnomo: Dialog dan gereja yang terus belajar. Retrieved January 22, 2020, from <https://www.hidupkatolik.com/2019/07/30/38272/pastor-alloysius-budi-purnomo-dialog-dan-gereja-yang-terus-belajar/>
- Tribunnews.com. (2018). Desa toleransi yang menggetarkan hati di Jawa Timur: Tidak ada sekat antar umat lain agama. Retrieved October 2, 2019, from <https://www.tribunnews.com/regional/2018/04/04/desa-toleransi-yang-menggetarkan-hati-di-jawa-timur-tidak-ada-sekat-antar-umat-lain-agama?page=2>
- Wahid Foundation. (2015). Tentang Wahid Foundation. Retrieved January 22, 2020, from <http://wahidfoundation.org/index.php/page/index/About-Us>
- Wahid Foundation. (2018). *Laporan tahunan kemerdekaan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2017: Mengikis politik kebencian*. Retrieved from <http://wahidfoundation.org/index.php/publication/detail/Laporan-Tahunan-Kemerdekaan-BeragamaBerkeyakinan-KBB-di-Indonesia-2017>
- Wahid Foundation. (2019). *Mencipta generasi penjaga kebhinekaan: Panduan Sekolah Damai, konsep dan indikator*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Yayasan Cahaya Guru. (2019). *Cahaya bineka taman bangsa: Narasi dan panduan kegiatan pengembangan nilai Pancasila (buku 2)*. Jakarta: Yayasan Cahaya Guru.

BIODATA PENULIS

Herman Hendrik adalah seorang Peneliti Ahli Muda pada Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya dalam bidang antropologi sosial di Universitas Indonesia. Sementara pendidikan magisternya, dalam bidang kajian kebijakan, ditempuh di Universitas Padjadjaran (UNPAD) dan National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) dengan skema *double degree* dengan beasiswa dari Pusbindiklatren Bappenas.

Ihya Ulumuddin adalah seorang Peneliti Ahli Muda pada Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya dalam bidang Sosiologi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan pendidikan magisternya, dalam bidang yang sama, di Universitas Indonesia.

Genardi Atmadiredja adalah seorang Peneliti Ahli Muda pada Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Ia menyelesaikan pendidikan sarjana dan magisternya dalam bidang seni rupa di Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Institut Teknologi Bandung (ITB). Pendidikan magisternya ditempuh dengan beasiswa dari Beasiswa Unggulan Kemdikbud.

Imelda Widjaja adalah seorang Analis Data Program dan Tata Operasional Penelitian pada Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya dalam bidang statistika di Jurusan Matematika Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar.

INDEKS

D

Depok v, vii, viii, 7, 17, 23, 24, 25,
26, 45, 48, 54, 58

I

Interfidei ix, 49, 50, 52, 63, 71

K

Kemenag ix, 2, 3, 73

M

Maarif Institute 4, 13, 72

Medan v, viii, 4, 7, 8, 17, 39, 40, 41,
46, 51, 56, 57, 58, 63, 73

O

OSIS ix, 4, 25, 29, 35, 36, 55, 57, 58,
72

P

Permendikbud tentang Penumbuhan
Budi Pekerti 9

Permendikbud tentang PPK 9, 10

Permendiknas tentang Pembinaan
Kesiswaan 9

PPIM UIN 4, 72

Purwakarta v, vii, viii, 7, 17, 18,
19, 20, 45, 46, 47, 52, 53, 54,
57, 58, 62

R

ROHIS ix, 13, 30, 34, 36, 37, 41

ROKAT ix, 30, 35

ROKRIS ix, 30, 35

Romo Budi 51, 63, 72

S

Semarang v, vii, viii, 7, 8, 17, 34,
35, 36, 37, 38, 44, 45, 50, 51,
52, 55, 57, 58, 62, 63
Setara Institute 3, 73

U

UU Sisdiknas 9, 10

W

Wahid Foundation 3, 7, 35, 50, 52,
62, 74

Y

Yayasan Cahaya Guru 4, 74
Yogyakarta v, vii, viii, 7, 17, 28, 29,
30, 31, 45, 46, 49, 52, 54, 55,
57, 58, 61, 62, 63, 65, 71, 73

Buku ini menyajikan praktik pengelolaan keragaman agama di sekolah, khususnya di lima daerah: Kabupaten Purwakarta, Kota Depok, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Medan. Ragam praktik yang dilakukan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu normatif, mandiri, maju, dan inovatif. Sekolah yang masuk kategori normatif umumnya masih sebatas mengandalkan kurikulum yang ada, misalnya melalui materi PPKn dan program Penguatan Pendidikan Karakter. Pada kategori mandiri, terdapat beberapa sekolah yang memiliki guru agama dengan inisiatif mandiri menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap keragaman di sekolah tempat ia mengajar. Sekolah dengan kategori maju dalam pengelolaan keragaman biasanya telah mendapat intervensi dari pihak luar, misalnya pendampingan oleh organisasi nonpemerintah. Sementara sekolah yang inovatif umumnya sudah berani berinovasi dalam kurikulum, misalnya dengan menghadirkan pendidikan antaragama atau memodifikasi mata pelajaran tertentu dalam rangka mendukung pengelolaan keragaman. Praktik yang terakhir ini biasanya terjadi di sekolah-sekolah swasta. Berbagai praktik pengelolaan keragaman di sekolah tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai pihak, seperti kepala daerah, organisasi nonpemerintah, tokoh agama, yayasan pendidikan, dan peran guru pendidikan agama (Islam).



Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2020

ISBN 978-602-0792-80-4



9 786020 792804